



DISDIK JATENG

LKj-IP 2025

DISDIKBUD PROV. JATENG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2026**

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN COVER	
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	4
KATA PENGANTAR	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Isu-isu Strategis	9
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	11
1.4 Sistematika Penulisan	14
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025	15
1.6. Langkah Perbaikan Internal OPD.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	18
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	23
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	67
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	73
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	73
3.2 Realisasi Anggaran	104
3.3 Inovasi.....	107
3.4 Penghargaan	110
BAB IV PENUTUP	115
4.1 Kesimpulan	115
4.2 Rekomendasi.....	119
LAMPIRAN	118
- Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025	119
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	120

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Sebaran Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	6
1.2. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	7
1.3. Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	9
1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	10
2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2026	14
2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	15
2.3 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	18
2.4 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025	18
2.5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	20
2.6 Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator dan Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	21
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	69
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	72
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 - 2025	77
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026.....	79
3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional	80
3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	81
3.7 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	84
3.8 Analisis Program /Kegiatan Penunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun	



2025	85
3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	104



DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.....	5
2.5.1 Tampilan aplikasi e-planing.jatengprov.go.id.....	29
2.5.2 Tampilan aplikasi e-budgeting.jatengprov.go.id.....	30
2.5.3 Tampilan aplikasi e-RKO.jatengprov.go.id.....	30
2.5.4 Tampilan aplikasi e-Controlling.jatengprov.go.id.....	31
2.5.5 Tampilan aplikasi duren pulen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.....	32
2.5.6 Tampilan aplikasi data guru.pdkjateng.go.id.....	32
2.5.7 Tampilan aplikasi e-gttptt.pdkjateng.go.id.....	33
2.5.8 Tampilan aplikasi LKP (was.pdkjateng.go.id).....	33



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pergub No. 42 dan 78 tahun 2021 serta 18 tahun 2023 Tentang SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 - 2026 serta Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Semarang, 25 Februari 2026



Dr. Wahidin S.Pd., M.Pd., S.IPem., M.Eng.
Kepala Dinas

NIP. 197212061994121001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran yang layak. Artinya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28c ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan menempati posisi strategis bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mengingat kedua urusan tersebut bersifat saling mempengaruhi, melengkapi dan memperkaya. Dalam realitasnya, pendidikan dan kebudayaan dapat dipahami sebagai siklus berkelanjutan, sehingga proses pendidikan dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang melingkupi kehidupan manusia. Disisi lain keluaran pendidikan dalam kurun waktu tertentu mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang berdampak pada perubahan nilai budaya umat manusia.

Dalam konteks urusan pendidikan, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (3) menegaskan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang – undang. Dalam tataran regulasi khusus tatakelola urusan pendidikan diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Urusan kebudayaan diatur dalam Pasal 32 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Jabaran atas amanat pemajuan kebudayaan Sebagai landasan normatif urusan kebudayaan telah diterbitkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai landasan normatif bagi Pemerintah dan Daerah dalam melaksanakan “pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan”.

Dengan demikian dipahami bahwa titik temu pengelolaan urusan pendidikan dan kebudayaan berada pada pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut. Oleh karena itu, pemerintah di semua tingkatan wajib menyelenggarakan layanan pendidikan kepada rakyat tanpa diskriminasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan bakat, minat dan potensi diri secara utuh. Sehingga layanan pendidikan tidak hanya bertumpu kepada domain akademis semata tetapi juga mencakup aspek nilai, etika, estetika dan norma budaya yang terurai dalam kebhinekaan sebagai pondasi pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh sebab itu sejalan dengan Pergub Provinsi Jawa Tengah No. 18 dan 78 tahun 2021 serta 18 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan provinsi. Segala bentuk aktivitas dalam upaya penanganan permasalahan pada urusan pendidikan dan kebudayaan harus bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan Perangkat

Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Pergub Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

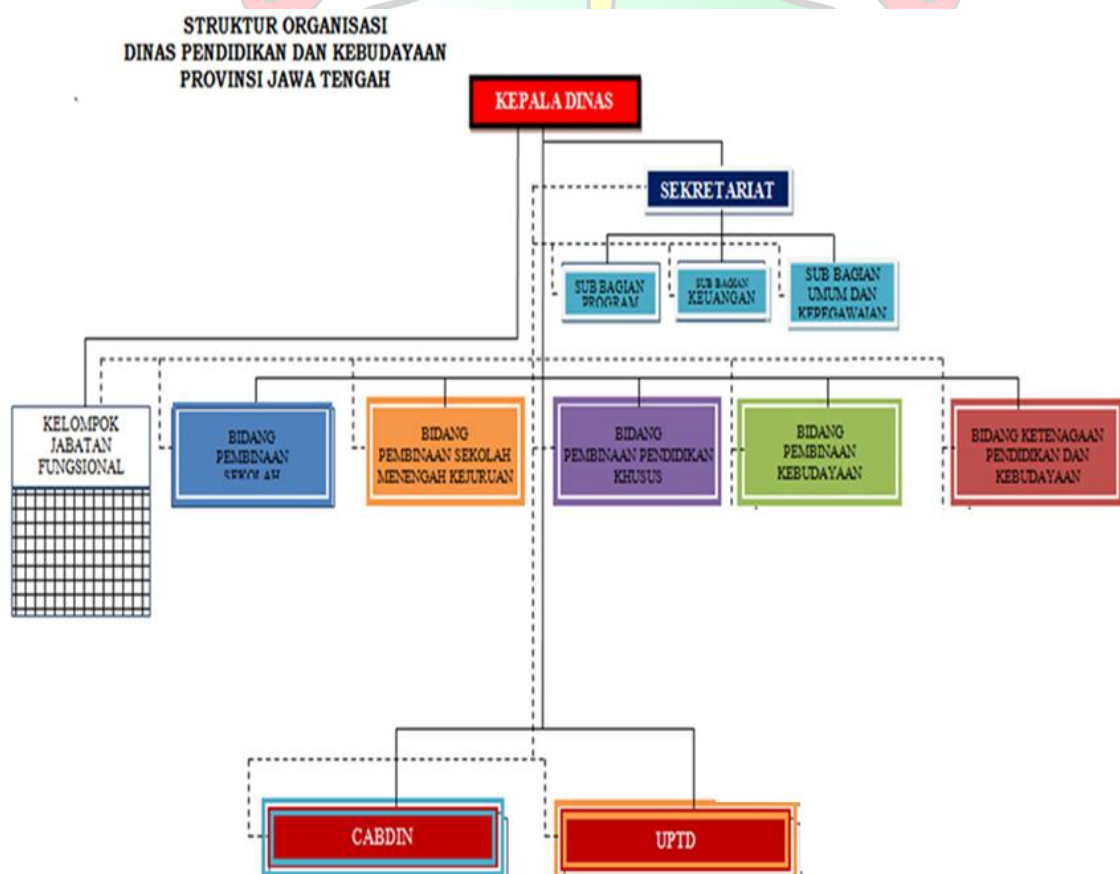
1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan madat kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah maka program kegiatan Disdikbud dapat diuraikan kedalam sebuah peta proses bisnis. Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu

kesatuan dokumen atau database organisasi. Peta proses bisnis menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Selanjutnya struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah



1.2 Isu- Isu Strategis

Isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah yang berkaitan dengan urusan pendidikan dan kebudayaan adalah :

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Sampai dengan tahun 2025 IPM Jawa Tengah mulai membaik yaitu sebesar 74,77 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya di angka 73,87. Capaian IPM tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah masih dibawah angka nasional sebesar 75,90. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita (yang disesuaikan). Aspek pendidikan perlu diperhatikan, karena Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah penduduk Jawa Tengah cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Harapan Lama Sekolah Jawa Tengah tahun 2025 sebesar 13,05 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,15 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun di Jawa Tengah hanya bersekolah sampai dengan SMP kelas II atau kelas VIII. Isu pendidikan yang penting diperhatikan adalah sistem pendidikan untuk semua dimana setiap penduduk usia sekolah memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas serta mampu mengakses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; pendidikan budaya dan karakter; serta pemerataan pendidikan guna mendorong partisipasi sekolah masyarakat. Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif. Pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah terutama usia produktif akan menjadi beban yang berat dalam lima tahun ke depan apabila tidak diantisipasi sejak saat ini.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah yang dihadapi, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Akses dan Pemerataan layanan Pendidikan dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sebagai implementasi kurikulum merdeka;
2. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);

3. Peningkatan Mutu Pendidikan dilakukan dengan Penyelarasan kurikulum yang adaptif serta implementasi penerapan pendidikan karakter ke dalam pengembangan kurikulum sebagai wujud penguatan pendidikan karakter, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, sertifikasi kompetensi siswa, dan pembinaan kesiswaan.
4. Peningkatan tata kelola pendidikan dilakukan dengan pengelolaan manajemen sekolah dan pembiayaan sekolah serta pemanfaatan sistem aplikasi perencanaan dan pelaporan anggaran sekolah (ARKAS, MARKAS, SIPERKASA)
5. Penguatan nilai budaya dan karakter masyarakat melalui pemajuan kebudayaan di masyarakat, internalisasi kurikulum muatan lokal dengan nilai budaya dan karakter, pengelolaan dan pemanfaatan kebudayaan serta pelestarian kesenian tradisional

1.3 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

a. SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 sebanyak 36.921 orang sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Sebaran Sumber Daya Manusia
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S3	35 orang
2	S2	3.639 orang
3	D4 – S1	32.086 orang
4	D1 – D3	235 orang
5	SD - SMP	926 orang



No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
	Total	36.921 orang

Sumber : Buku Profil Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 cut off Desember 2025





b. Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 1.2. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No.	Uraian	SALDO AWAL		PENAMBAHAN												PELEPASAN						SALDO AKHIR											
		TAHUN 2025		Jml.	Belanja Modal	Jml.	Belanja Hutang	Jml.	Belanja Barang Jasa	Jml.	Hibah	Jml.	Tukar Menukar	Jml.	Hasil Usaha Mandiri	Jml.	Mutasi Masuk	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Mutasi Keluar	REKLASIFIKASI			Jml.	Jumlah Kurang	Periode 202512				
		Jml.	Harga																					Jml.	Ke Aset Tetap	Jml.			Ke Aset Lainnya	Jml.	Harga		
																																BMD	BMH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	1.3.1.01	TANAH	6	71.613.846.000	-	-	-	2	4.535.907.004	-	-	-	-	1	120.000.000	2	2.975.617.050	5	7.631.524.054	1	2.032.500.000	-	-	-	-	1	2.032.500.000	10	77.212.870.054				
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	7	1.875.275.309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.875.275.309						
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	27	4.509.494.700	-	-	-	1	705.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	705.000.000	-	-	-	1	2.500.000	1	2.500.000	27	5.211.994.700				
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.504	18.938.965.706	109	535.568.500	-	7	39.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	575.468.500	27	169.361.286	-	-	-	27	169.361.286	3.593	19.345.072.920				
7	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	394	4.087.564.444	18	1.258.666.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1.258.666.000	4	62.101.694	-	3	10.200.000	7	72.301.694	405	5.273.928.750				
8	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	67	529.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	529.050.000					
9	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	1.3.2.09	ALAT PERSENUJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	827	16.395.720.136	121	2.150.248.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	2.150.248.514	-	-	-	-	-	-	-	948	18.545.968.650				
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	12	12.834.839.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	122.928.000	-	-	1	122.928.000	1	20.000.000	-	-	-	1	20.000.000	12	12.937.767.400				
22	1.3.3.02	MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	3	573.193.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	573.193.250				
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	1.3.4.03	INSTALASI	6	732.806.902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	732.806.902				
28	1.3.4.04	JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	10.385	343.974.164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.385	343.974.164				
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	12	68.919.000	1	19.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19.000.000	-	-	-	-	-	-	-	13	87.919.000				
31	1.3.5.03	HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	1.3.5.05	TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			15.250	132.503.649.011	249	3.963.483.014	-	7	39.900.000	3	5.240.907.004	-	-	-	2	242.928.000	2	2.975.617.050	263	12.462.835.068	33	2.283.962.980	-	-	4	12.700.000	37	2.296.662.980	15.476	142.669.821.099			

c. Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Tabel 1.3. Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp.) ANGGARAN PERUBAHAN
5	BELANJA DAERAH	8.638.182.450.000
5.1	BELANJA OPERASI	8.252.052.668.000
5.1.1	Belanja Pegawai	5.081.921.333.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.812.832.595.000
5.1.5	Belanja Hibah	1.342.298.740.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	15.000.000.000
5.2	BELANJA MODAL	386.129.782.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	224.942.675.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.569.351.000
5.2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	116.489.756.000
5.2.4	Belanja Modal Aset Lainnya	128.000.000

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi serta langkah perbaikan internal OPD yang berisi tindak lanjut dari rekomendasi LKjIP tahun sebelumnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan satndar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Tabel 1.4. Tabel Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Memasukan indikator kinerja Kasubag TU SMA/SMK pada dokumen perencanaan (renstra dan renja) serta secara teknis agar berkordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah secara tertulis	Dinas Pendidikan telah melakukan rapat koordinasi terkait rencana penetapan indikator kinerja kasubag TU secara internal dan eksternal. Namun untuk penetapan indikator

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		tersebut belum termuat pada dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) Bukti Dukung : 1. Undangan Evaluasi Implementasi Sakip baik internal maupun eksternal
2.	Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 untuk Kasubbag TU SMA/SMK/SLB	Kepala Subbag TU SMA/SMK/SLB telah diarahkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Bukti Dukung : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan terkait Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 (terlampir)

1.6. Langkah Perbaikan Internal OPD

Pada tahun 2024 LKJiP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah disusun, guna meningkatkan kinerja dan menyelesaikan isu strategis yang belum terselesaikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa di masa mendatang maka rekomendasi atas LKJiP Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Mengupayakan perluasan akses layanan Pendidikan maka diperlukan penambahan daya tampung pada Satuan Pendidikan dan/atau melalui perluasan inovasi layanan Pendidikan, antara lain melalui Kerjasama dengan pihak swasta (sekolah swasta) dalam PPDB.
2. Menyediakan sarpras khususnya untuk pengadaan mobilitas pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Rekomendasi ini diberikan karena mengingat banyaknya ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) yang kesulitan mendapatkan akses untuk menuju ke tempat Pendidikan dikarenakan Lokasi ABK jauh dari jangkauan

Terhadap rekomendasi di atas maka pada tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam seleksi penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 telah membuka jalur kemitraan dengan swasta, dimana jalur tersebut khusus untuk sekolah swasta yang telah mempunyai MOU dengan Dinas Pendidikan untuk menampung siswa miskin sebanyak 36 siswa per satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang telah melaksanakan MOU dengan Dinas Pendidikan sebanyak 139 sekolah dengan target atau kuota siswa melalui jalur kemitraan sebanyak 5.004 siswa. Kebijakan ini diambil dalam rangka upaya pencegahan anak putus

sekolah.

- 2) Pengadaan sarana prasarana mobilitas untuk disabilitas telah masuk pada rencana tahun 2026 sebanyak 1 unit mobil khusus untuk SLB dengan jangkauan siswa rata – rata di daerah terpencil. Upaya ini dilakukan dalam rangka pemerataan akses untuk siswa disabilitas.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam periode Tahun 2024 - 2025 direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan “Mewujudkan Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lesatri” dengan empat sasaran daerah yang harus diwujudkan yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian yang tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang dinamis

Berdasarkan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 - 2026 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan sasaran daerah, terutama pada sasaran ke 2 yaitu **“Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif”**.

Sasaran daerah ke 2 selaras dengan tujuan yang akan di capai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan inklusif;
2. Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

Urusan Pendidikan mendukung pencapaian sasaran daerah Provinsi Jawa Tengah yang ke 2 Jawa Tengah yaitu **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif**. Pencapaian sasaran daerah tersebut dituangkan ke dalam sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu: (1) Meningkatnya akses pemerataan pendidikan (2) Meningkatnya mutu pendidikan (3) Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun (4) Meningkatnya pelestarian budaya (5) Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan (6) Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan (7) Meningkatnya



kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah (8) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah. Adapun tujuan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah beserta target kinerjanya di tuangkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB		Disparitas APK SMA/SMK/SLB	7,10	7,00	6,79			
		Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yg memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja							
			APK SMA/SMK/SLB	47,68	48,00	48,32			
			Presentase sarpras sesuai standar	78,79	79,59	80,43			
			Presentase guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi akademis	90,75	91,50	91,55			
			Rasio guru terhadap Rombongan belajar pada SMA/SMK/SLB	0,08	0,08	0,08			
			APK SMA/SMK/SLB	47,68	48,00	48,32			
			Presentase sarpras sesuai standar	78,79	79,59	80,43			
			Presentase guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi akademis	90,75	91,50	91,55			



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rasio guru terhadap Rombongan belajar pada SMA/SMK/SLB	0,08	0,08	0,08			
	Penguatan karakter dan ketahanan budaya		Angka Partisipasi Seni Budaya	11,00	11,50	12			
		Meningkatnya pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan local) dan ketahanan budaya	Presentase jenis budaya terlayani	5,9	6,2	6,82			
	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	76,00	78,00	80,00			
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	76,00	78,00	80,00			
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	80,75	81,00	81,25			
1	Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan inklusif		Rata-rata Lama Sekolah				8,08	8,14	8,20
			Harapan Lama Sekolah				12,94	12,96	12,98
		1.1 Meningkatkan akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB				82,92	83,29	83,60
		1.2 Meningkatkan mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah				85,44	85,94	86,44
			Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah				66,08	67,25	68,42
		1.3 Meningkatkan partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th				70,93	70,97	71,02



NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat			Angka Melek Budaya				52,32	53,82	55,32
		2.1	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional				15,89	16,89	17,89
			Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan				22,44	23,44	24,44
			Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani				28,23	31,70	35,17
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah			Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)				74,57	75,07	75,57
		3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko				3,21	3,28	3,45
		3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				3,20	3,25	3,30

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Menjabarkan dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.14



NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025
1	2	3		4	5	6
	dan inklusif			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.96
		1.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	%	83.29
		1.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	%	85.94
				Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	%	67.25
		1.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	%	70.97
2	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat			Angka Melek Budaya	%	53.82
		2.1	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	%	16.89
			Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	%	23.44
			Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	%	31.7
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah			Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	75.07
		3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3.28
		3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3.25

Tabel 2.3
Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 2025
Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	1. Meningkatkan akses perluasan pemerataan pendidikan SMA, SMK dan SLB 2. Meningkatkan pengendalian penyelenggaraan pendidikan 3. Meningkatkan cakupan pemerataan guru dan ketenagapendidikan SMA, SMK dan SLB	Penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan dan diskriminasi, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana
	Meningkatnya mutu pendidikan	1. Meningkatkan pengembangan pendidikan karakter siswa 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan SMA, SMK, SLB	Pengembangan internalisasi pendidikan karakter melalui implementasi kurikulum adaptif
	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun	Menurunkan angka putus sekolah SMA, SMK dan SLB	
Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Meningkatnya pelestarian budaya	1. Meningkatkan tata kelola pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) 2. Perluasan ruang ekspresi berkesenian masyarakat	Memperkuat Ekosistem pembinaan obyek pemajuan kebudayaan
	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Obyek Pemajuan Kebudayaan	1. Meningkatkan tata kelola pelestarian Cagar Budaya (CB) 2. Meningkatkan ragam inovasi display koleksi	Memperkuat Ekosistem pembinaan obyek Cagar Budaya
	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	1. Meningkatkan Kompetensi SDM Kebudayaan; 2. Meningkatkan kapasitas lembaga kebudayaan	Memperkuat Ekosistem pembinaan SDM dan lembaga kebudayaan

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 2.4 Struktur Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.638.182.450.000



No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.241.010.512.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.558.315.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	857.454.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	252.611.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.707.041.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.650.745.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.867.016.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.969.981.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.361.891.269.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.266.368.569.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.949.085.770.000
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	146.436.930.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	458.646.000
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	374.623.000
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	84.023.000
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	851.994.000
	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	851.994.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	622.844.000
	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	516.250.000
	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	106.594.000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.227.041.000
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.506.987.000
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	3.720.054.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	22.786.072.000
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22.786.072.000
8	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	574.051.000
	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	574.051.000
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	857.240.000
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	181.332.000
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	675.908.000
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.902.781.000
	Pengelolaan Museum Provinsi	2.902.781.000

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun 2025 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah pada awal tahun anggaran 2025 yang terdiri dari 10 program yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Namun di bulan September 2025 terdapat anggaran perubahan yang mengakibatkan terjadi beberapa perubahan pada target dan anggaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sehingga disusunlah Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 antara Kepala Dinas dengan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Kriteria keberhasilan Perjanjian Kinerja ini ditunjukkan dengan selisih positif capaian hasil indikator *outcome* terhadap target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selanjutnya Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	%	53,82
1.1.	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	%	16,89



No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	%	23,44
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	%	31,7
2	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan iklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,14
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,96
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	%	83,29
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	%	85,94
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	%	67,25
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	%	70,97
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di pernakgat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	75,07
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,28
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,25

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator dan Pengawas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
A	Indikator Program				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
1,1		Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	90	910.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1,2		Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	1	17.635.399.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1,3		Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	79,12	729.997.337.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1,4		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	56	1.819.346.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
1,5		Persentase angka putus sekolah SMA	2,28	13.982.663.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1,6		Persentase angka putus sekolah SMK	0,024	21.475.950.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
1,7		Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	76,5	71.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
1,8		Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	0,6	11.811.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
1,9		Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	58,82	1.406.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
1,1		Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	54,5	1.366.071.498.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
1,11		Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	18,56	1.317.270.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
1,12		Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	0,85	3.784.769.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
1,13		Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	10	84.253.102.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
1,14		Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	68,18	1.004.887.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
1,15		Persentase angka putus sekolah SLB	3,2	2.869.555.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
1,16		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	84,1	3.402.856.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Ketenagaan Dikbud



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
1,17		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	20	894.003.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
1,18		Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	20	676.086.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
1,19		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	7,5	268.245.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
1,2		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	86,34	79.171.864.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
1,21		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	90,9	27.160.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
1,22		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	76,84	8.318.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
1,23		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	4,2	296.950.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
1,24		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	83,73	41.409.785.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
1,25		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	9,5	241.427.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
1,26		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	85,71	53.963.091.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
1,27		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	77,96	23.112.410.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
1,28		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	75,1	35.733.002.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
					CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
1,29		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	1,5	193.675.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
1,3		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	71,25	34.040.319.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
1,31		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	1,93	277.678.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
1,32		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	99,5	52.848.365.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
1,33		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	94,23	44.391.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
1,34		APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	80,17	19.385.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
1,35		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	4	189.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
1,36		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	93	57.279.325.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
1,37		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	2,75	105.486.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
1,38		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	89,62	34.339.297.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
1,39		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	72,84	7.241.300.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
1,4		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	77,25	12.554.495.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
1,41		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	8,7	111.987.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
1,42		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	76,13	53.136.246.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
1,43		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	5,5	278.025.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
1,44		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	88,9	81.353.008.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
1,45		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	81,25	23.866.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
1,46		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	78,06	29.623.942.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
1,47		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	19,84	205.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
1,48		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	85,17	55.914.014.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
1,49		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	88,14	22.884.108.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
1,5		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	4,84	369.724.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
1,51		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	78,48	38.134.389.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
1,52		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	2,08	180.435.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
1,53		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	83	58.613.926.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
1,54		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	81,4	70.957.183.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
1,55		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	88,26	16.952.038.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
					CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
1,56		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	2,53	234.695.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
1,57		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	88,05	42.043.216.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
2,1		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	89,56	33.512.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
2,2		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	81,72	17.375.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
2,3		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	83,77	41.755.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
2,4		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	82,27	24.020.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
2,5		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	88,84	40.797.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
2,6		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	86,99	34.735.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
2,7		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	89,33	28.243.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
2,8		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	89,53	6.600.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
2,9		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	86,35	42.225.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
2,1		Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	81,47	84.135.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
2,11		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	83,77	50.829.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
					CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
2,12		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	85,8	29.425.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
2,13		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	86,56	24.995.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
3,1		Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	78,2	851.994.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Ketenagaan Dikbud
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				
4,1		Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	100	94.054.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
4,2		Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	94,29	145.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
4,3		Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	100	46.173.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
4,4		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	3	26.713.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
4,5		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	100	20.217.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
4,6		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	15	30.978.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
4,7		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	15	28.377.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
4,8		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	25	21.965.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
4,9		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan	100	25.260.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
		pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI			CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
4,1		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	100	20.090.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
4,11		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	100	3.700.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
4,12		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	50	55.440.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
4,13		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	2,71	36.177.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
4,14		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	4,76	24.645.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
4,15		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	100	24.470.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
4,16		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	100	19.585.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
1,1		Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	24,09	1.213.971.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
1,2		Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	26,16	1.992.992.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
1,3		Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	52,38	513.995.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
1,4		Persentase cakupan pelestarian seni	100	2.506.083.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
2	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional				



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
2,1		Tingkat partisipasi seni tradisi	11,1	22.786.072.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
3,1		Persentase akses literasi sejarah	54,67	574.051.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
4,1		Persentase cagar budaya berperingkat nasional	13,15	693.597.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
4,2		Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	26,73	163.643.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
5,1		Nilai survey kepuasan pengunjung museum	90,11	2.902.781.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
1,1		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	64.558.315.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat
1,2		Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	5.128.909.038.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat
1,3		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	10.912.366.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
1,4		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan	100	6.032.690.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Taman Budaya



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
		keuangan perangkat daerah			Jawa Tengah Kelas A
1,5		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	4.484.959.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
1,6		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.237.300.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
1,7		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.322.490.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
1,8		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	3.412.760.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
1,9		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	2.945.135.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
1,1		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	939.807.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
1,11		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.075.600.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
1,12		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	3.036.794.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
1,13		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.951.249.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
1,14		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	2.613.960.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
1,15		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	2.467.361.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
1,16		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	2.193.380.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
1,17		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan	100	1.572.390.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
		keuangan perangkat daerah			CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
1,18		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1.344.918.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
B	Indikator Kegiatan				
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				
1.1		Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan	570	910.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1.2		Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan	5	17.635.399.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1.3		Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru	27	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1.4		Jumlah siswa penerima dana BOS SMA	426.470	720.706.272.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1.5		Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi	2	9.291.065.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1.6		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional	93	1.819.346.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1.7		Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin	38.995	13.863.240.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1.8		Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA	1	119.423.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
1.9		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang bersertifikat kompetensi	13.996	797.464.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Ketenagaan Dikbud
1.10		Jumlah Sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	171	431.932.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
1.11		Jumlah Guru SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	5.000	305.195.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
1.12		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I	76,68	16.320.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
1.13		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I	9	103.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
1.14		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	14.158	74.320.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
1.15		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	44.120	31.091.065.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
1.16		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	6	46.815.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
1.17		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II	30,572	1.938.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
1.18		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II	3	139.053.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
1.19		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	8.932	49.910.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
1.20		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	28.645	18.867.932.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
1.21		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	55	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
1.22		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III	72,4	16.441.360.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
1.23		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III	7	67.681.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
					CABANG DINAS PENDIDIKAN III
1.24		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III	35.163	20.485.145.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
1.25		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III	10.945	52.482.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
1.26		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	24	40.025.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
1.27		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV	73,7	21.706.502.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
1.28		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV	3	82.570.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
1.29		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	8.556	50.267.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
1.30		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	28.262	11.938.938.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
1.31		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	58	7.995.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
1.32		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V	69,37	28.367.505.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
1.33		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V	9	121.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
1.34		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	30.217	22.676.820.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
1.35		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	11.531	41.430.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
1.36		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	62	39.140.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
1.37		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI	85	14.460.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
1.38		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI	21	74.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
1.39		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	11.853	56.680.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
1.40		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	27.992	21.136.512.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
1.41		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	15	5.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
1.42		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII	50,28	4.081.300.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
1.43		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII	22	38.565.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
1.44		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	30.638	14.739.120.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
1.45		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	10.507	42.190.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
1.46		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	36.385	25.120.124.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
1.47		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	11.520	39.330.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
1.48		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	5	40.400.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
1.49		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	78,4	9.020.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
1.50		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX	81,02	13.930.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
					CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
1.51		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX	1	76.300.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
1.52		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	45.261	26.515.646.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
1.53		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	15.087	34.225.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
1.54		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	68	15.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
1.55		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X	66,9	27.857.920.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
1.56		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X	5	116.700.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
1.57		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	12.940	51.645.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
1.58		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	39.788	22.806.792.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
1.59		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	79	24.401.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
1.60		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI	82,96	13.980.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
1.61		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI	7	132.824.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
1.62		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	9.099	49.208.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
1.63		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	28.183	17.195.341.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
1.64		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	5	25.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
1.65		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII	80,5	48.787.183.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
1.66		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII	6	75.540.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
1.67		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	34.989	21.610.476.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
1.68		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	11.663	30.024.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
1.69		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	65	22.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
1.70		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	75,26	9.432.038.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
1.71		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	12	71.635.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
1.72		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	8.050	54.236.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
1.73		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	24.800	17.990.223.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
2.1		Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan	213	71.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
2.2		Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK	3	11.811.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
2.3		Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK	71	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
2.4		Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK	1.276.225	1.345.215.898.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
2.5		Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi	1.547	20.855.600.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
2.6		Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin	57.257	21.375.950.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
2.7		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional	2.256	1.406.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
2.8		Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK	4	100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
2.9		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang bersertifikat kompetensi	955	2.507.232.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Ketenagaan Dikbud
2.10		Jumlah Sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	319	271.092.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
2.11		Jumlah Guru SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	9.000	313.311.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
2.12		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I	91	8.600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
2.13		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I	17	95.368.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
2.14		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	681.200	53.119.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
2.15		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	681.200	44.214.114.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
2.16		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II	41,111	5.920.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
2.17		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II	1	131.147.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
2.18		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	11.634	59.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
2.19		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	39.086	20.384.011.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
2.20		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	107	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
2.21		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III	88,5	5.911.050.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
2.22		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III	15	117.114.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
2.23		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III	54.427	30.048.027.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
2.24		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	9.079	41.447.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
2.25		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	104	30.179.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
2.26		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IV	43,95	11.702.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
2.27		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IV	1	39.030.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
2.28		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	14.667	59.747.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
					CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
2.29		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	48.891	20.599.608.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
2.30		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	112	7.995.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
2.31		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V	88,09	15.595.003.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
2.32		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V	3	106.450.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
2.33		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	30.843	28.402.158.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
2.34		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	10.645	38.227.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
2.35		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	109	38.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
2.36		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI	89	2.835.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
2.37		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI	21	74.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
2.38		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	22.630	56.680.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
2.39		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	29.182	32.964.069.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
2.40		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	15	5.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
2.41		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII	64,18	2.010.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
2.42		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII	8	39.376.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
2.43		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	41.457	17.591.603.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
2.44		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	10.507	39.095.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
2.45		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII	60.855	26.466.617.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
2.46		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	19.630	54.180.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
2.47		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	8	50.387.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
2.48		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	89,6	2.650.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
2.49		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX	88,43	9.786.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
2.50		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX	5	155.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
2.51		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	96.914	51.781.819.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
2.52		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	30.286	104.880.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
2.53		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	154	20.900.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
2.54		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X	88,98	1.696.022.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
2.55		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X	5	60.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
					CABANG DINAS PENDIDIKAN X
2.56		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	29.188	110.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
2.57		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	90.481	31.217.386.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
2.58		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	147	61.126.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
2.59		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI	84,96	2.590.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
2.60		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI	6	182.189.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
2.61		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	16.406	47.296.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
2.62		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	54.637	19.379.905.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
2.63		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	8	52.175.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
2.64		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII	88,2	15.860.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
2.65		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII	5	60.665.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
2.66		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	93.058	34.419.492.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
2.67		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	31.020	33.835.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
2.68		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	146	22.300.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
2.69		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	84,77	7.060.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
2.70		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	3	100.385.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
2.71		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	14.040	49.202.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
2.72		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	46.700	22.148.809.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
3	Pengelolaan Pendidikan Khusus				
3.1		Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan	20	1.317.270.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
3.2		Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB	2	3.784.769.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
3.3		Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB	15	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
3.4		Jumlah siswa penerima dana BOS SLB	21.443	83.804.723.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
3.5		Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi	5	448.379.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
3.6		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional	15	1.004.887.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
3.7		Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin	4.707	405.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
3.8		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	2.014.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
3.9		Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB	6	450.555.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
3.10		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang bersertifikat kompetensi	725	98.160.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Ketenagaan Dikbud
3.11		Jumlah Sekolah SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	38	190.979.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
3.12		Jumlah Guru SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	550	57.580.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
3.13		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I	90,08	2.240.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
3.14		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I	3	69.377.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
3.15		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	4.704	18.940.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
3.16		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	1.930	3.673.491.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
3.17		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II	75	460.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
3.18		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II	1	26.750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
3.19		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	136	14.740.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
3.20		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	660	2.034.192.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
3.21		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	2	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
3.22		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III	81,8	760.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
3.23		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III	2	56.632.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
3.24		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	1.749	3.234.056.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
3.25		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	375	18.563.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
3.26		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	11	13.167.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
3.27		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IV	42,98	2.324.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
3.28		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV	1	72.075.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
3.29		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	316	23.135.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
3.30		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	1.053	1.348.624.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
3.31		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	11	4.010.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
3.32		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V	92,52	429.290.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
3.33		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V	3	49.728.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
					CABANG DINAS PENDIDIKAN V
3.34		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	314	1.568.516.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
3.35		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	100	17.785.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
3.36		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	32	26.089.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
3.37		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI	88	2.090.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
3.38		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI	7	41.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
3.39		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	175	18.644.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
3.40		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	886	3.031.740.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
3.41		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	5	5.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
3.42		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII	96,0101	1.150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
3.43		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII	7	27.545.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
3.44		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	518	1.909.857.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
3.45		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	448	17.432.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
3.46		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	446	18.125.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
3.47		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	6	21.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
3.48		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	81,07	884.495.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
3.49		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII	1.505	1.437.870.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
3.50		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX	86,94	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
3.51		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX	2	46.525.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
3.52		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	2.218	2.853.438.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
3.53		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	738	18.175.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
3.54		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	14	8.125.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
3.55		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X	89,99	70.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
3.56		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X	3	28.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
3.57		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	361	20.481.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
3.58		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	361	1.616.143.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
3.59		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	10	6.040.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
3.60		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI	83,96	6.314.108.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
					CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
3.61		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI	4	54.711.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
3.62		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	165	20.695.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
3.63		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	644	1.352.269.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
3.64		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	2	12.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
3.65		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	1.700	2.460.479.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
3.66		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII	5	44.230.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
3.67		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII	88,7	6.310.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
3.68		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	566	8.970.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
3.69		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	5	5.550.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
3.70		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	81,12	460.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
3.71		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	3	62.675.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
3.72		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	325	25.880.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
3.73		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	1.410	1.774.866.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
4	Penetapan Kurikulum Muatan				



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
	Lokal Pendidikan Menengah				
4.1		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	45	13.222.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
4.2		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	126	12.350.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
4.3		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	55	5.250.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
4.4		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	107	5.250.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
4.5		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	45	12.925.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
4.6		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	70	21.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
4.7		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	100	6.725.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
4.8		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	0	13.310.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
4.9		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	66	12.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
4.10		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	116	17.940.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
4.11		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	33	13.475.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
4.12		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	26	13.475.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
4.13		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	60	10.104.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
4.14		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan	80	12.880.000	Dinas Pendidikan dan



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
		kurikulum adaptif CABDIN VII			Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
4.15		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	20	2.750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
4.16		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	33	2.750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
4.17		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	66	15.725.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
4.18		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	154	21.150.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
4.19		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	60	36.410.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
4.20		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	146	40.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
4.21		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	112	29.832.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
4.22		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	41	12.860.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
4.23		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	65	11.825.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
4.24		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	150	11.375.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
4.25		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	56	9.620.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
4.26		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	80	9.620.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
5	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus				
5.1		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan	8	7.940.000	Dinas Pendidikan dan



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
		kurikulum adaptif CABDIN I			Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
5.2		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	2	6.875.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
5.3		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	7	7.830.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
5.4		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	100	3.985.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
5.5		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	32	10.057.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
5.6		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	4	7.785.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
5.7		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	24	5.259.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
5.8		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	14	1.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
5.9		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	14	5.350.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
5.10		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	8	7.725.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
5.11		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	4	8.137.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
5.12		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	5	6.225.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
5.13		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	8	5.755.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
6	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi				



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
6.1		Jumlah kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB	24.132	851.994.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Ketenagaan Dikbud
7	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
7.1		Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas	15	94.054.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMA
7.2		Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan	75	145.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan SMK
7.3		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	2	10.370.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
7.4		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	2	10.386.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
7.5		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN II	3	7.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
7.6		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN II	3	7.650.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
7.7		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN III	1	12.890.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
7.8		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN III	2	12.913.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
7.9		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN IV	1	11.565.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
7.10		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN IV	2	11.170.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
7.11		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN V	1	10.080.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
7.12		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN V	1	9.250.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
					CABANG DINAS PENDIDIKAN V
7.13		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN VI	1	9.945.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
7.14		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN VI	1	9.940.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
7.15		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN VII	2	10.090.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
7.16		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN VII	2	7.150.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
7.17		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN VIII	2	1.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
7.18		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN VIII	2	1.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
7.19		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN IX	1	22.030.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
7.20		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX	8	25.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
7.21		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN X	1	10.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
7.22		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN X	1	20.412.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
7.23		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN XI	1	10.410.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
7.24		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN XI	1	9.235.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
7.25		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN XII	2	10.135.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
7.26		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN XII	2	9.235.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
7.27		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMA CABDIN XIII	2	7.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
7.28		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SMK CABDIN XIII	2	9.190.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
8	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
8.1		Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	3	46.173.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Diksus
8.2		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN I	2	5.957.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
8.3		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN II	1	4.917.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
8.4		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN III	1	5.175.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
8.5		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN IV	1	5.642.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
8.6		Jumlah kajian perijinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	2.635.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
8.7		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN VI	1	5.375.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
8.8		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN VII	2	2.850.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
8.9		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN VIII	2	1.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
8.10		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN IX	1	7.610.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
					CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
8.11		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN X	1	5.765.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
8.12		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN XI	1	5.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
8.13		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN XII	1	5.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
8.14		Jumlah kajian perijinan penyelenggaraan pendidikan SLB CABDIN XIII	1	2.895.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
1.1		Persentase OPK yang Berdaya	25,35	1.992.992.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
1.2		Persentase SDM Kebudayaan berkompeten	6,46	513.995.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				
2.1		Persentase partisipasi Pemanfaatan OPK Peringkat Nasional	69,05	1.213.971.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
2.2		Jumlah kelompok seni yang difasilitasi	275	2.506.083.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
3	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
3.1		Persentase Lembaga Seni aktif berkarya	26,74	22.786.072.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
					Bidang Pembinaan Kebudayaan
4	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi				
4.1		Persentase Peningkatan Karya Literasi sejarah (tokoh sejarah, peristiwa bersejarah, toponimi, sejarah yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia)	53,55	574.051.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
5	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				
5.1		Persentase Cagar Budaya Berperingkat Provinsi	8,77	181.332.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
6	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				
6.1		Persentase partisipasi pemanfaatan cagar budaya	93,23	512.265.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
6.2		Persentase cagar budaya layak uji peringkat	8,55	163.643.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Bidang Pembinaan Kebudayaan
7	Pengelolaan Museum Provinsi				
7.1		Jumlah pengunjung museum	57.500	2.902.781.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.1		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100	64.558.315.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2.1		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12	5.084.147.349.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
3.1		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4	504.308.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat
3.2		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	45.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Taman Budaya



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
					Jawa Tengah Kelas A
.3		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	40.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
3.4		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	30.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
3.5		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
3.6		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
3.7		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	11.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
3.8		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	65.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
3.9		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2	30.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
3.10		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12	30.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
3.11		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	30.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
3.12		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2	2.846.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
3.13		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	18.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
4.1		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100	252.611.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
5.1		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	2.397.771.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat
5.2		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	2	236.466.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
5.3		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	421.390.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
5.4		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	396.589.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
5.5		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	230.250.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
5.6		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	320.600.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
5.7		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	303.250.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
5.8		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	257.975.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
5.9		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	294.825.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
5.10		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	283.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
5.11		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	276.499.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
5.12		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	100	379.799.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
5.13		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	623.480.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
5.14		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	413.701.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
5.15		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	350.060.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
5.16		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	263.668.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
5.17		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	256.918.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
6.1		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	225	4.530.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat
6.2		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	10	9.270.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
6.3		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	7	710.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
6.4		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	8	885.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
6.5		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	10	206.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
6.6		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	20	500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
6.7		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	24	888.590.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
6.8		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	5	2.157.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
6.9		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	10	101.375.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
6.10		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	6	240.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
6.11		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	12	756.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
6.12		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	10	409.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
6.13		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	23	957.280.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
6.14		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	5	1.330.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
6.15		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	16	840.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
6.16		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1	745.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
6.17		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	17	125.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.1		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4	34.916.572.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat
7.2		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4	880.750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi



No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
					Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
7.3		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12	2.028.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
7.4		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4	1.970.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
7.5		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4	456.050.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
7.6		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1	433.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
7.7		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	36	561.920.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
7.8		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	2	425.900.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
7.9		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	413.137.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V
7.10		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4	458.400.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
7.11		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4	670.537.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
7.12		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4	477.750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
7.13		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12	431.700.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
7.14		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12	343.160.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X



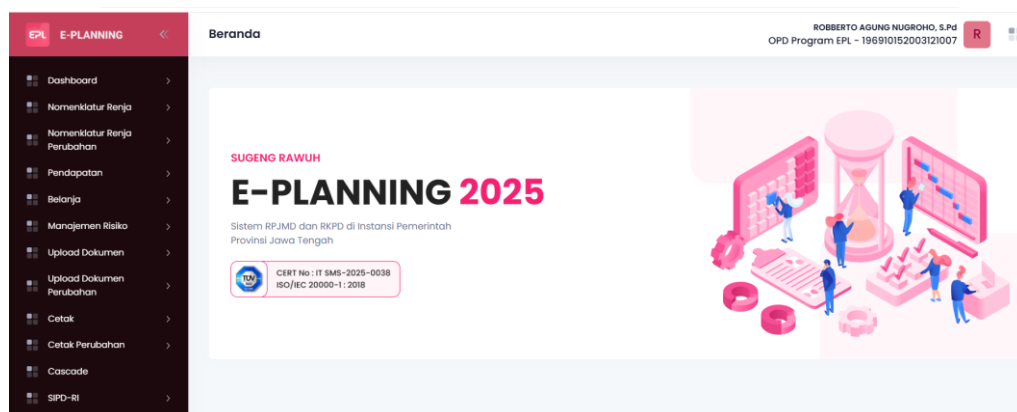
No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
7.15		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	21	642.340.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
7.16		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	378.900.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
7.17		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	48	378.700.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
8.1		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	407	2.160.427.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat
8.2		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	280	525.150.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
8.3		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	22	2.828.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
8.4		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	28	1.193.370.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
8.5		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	25	315.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN I
8.6		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	15	68.890.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN II
8.7		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	75	1.609.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN III
8.8		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	95	103.760.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
8.9		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1	118.970.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN V

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab Indikator Kinerja
1		2	8	11	14
8.10		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1	93.400.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
8.11		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	539	1.268.758.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
8.12		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	10	654.700.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
8.13		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	49	571.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
8.14		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	24	350.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN X
8.15		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	146	360.980.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
8.16		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	18	181.976.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
8.17		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	105	565.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memanfaatkan aplikasi GRMS Provinsi Jawa Tengah, mulai dari tahap perencanaan dan evaluasi. Aplikasi yang mendukung dalam penerapan SAKIP antara lain :

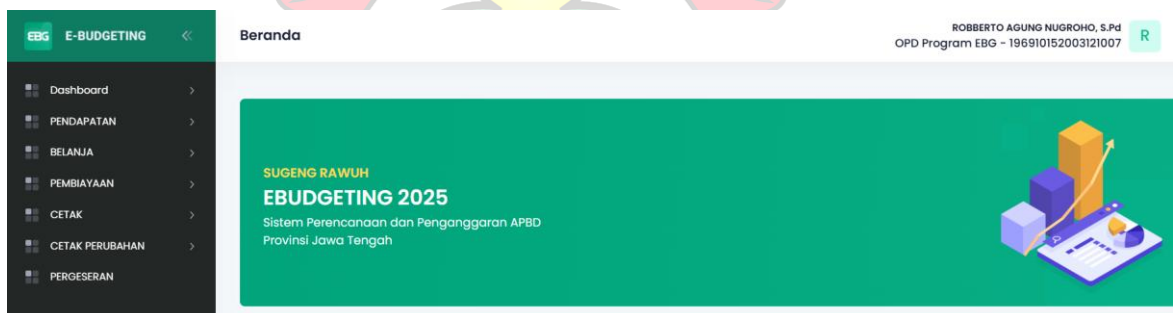
a. e-planning



Gambar 2.5.1 : Tampilan aplikasi e-planing.jatengprov.go.id

Aplikasi ini digunakan dalam rangka menyusun perencanaan strategis (Renstra) maupun rencana kerja tahunan (Renja) perangkat daerah. Selain menggunakan instrument di atas, secara internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melaksanakan verifikasi usulan anggaran dan target kinerja yang telah di inputkan dalam aplikasi e-planing tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka pencermatan usulan anggaran apakah sesuai dengan program prioritas dan pencermatan terhadap anggaran tersebut apakah mendukung indikator kinerja atau tidak.

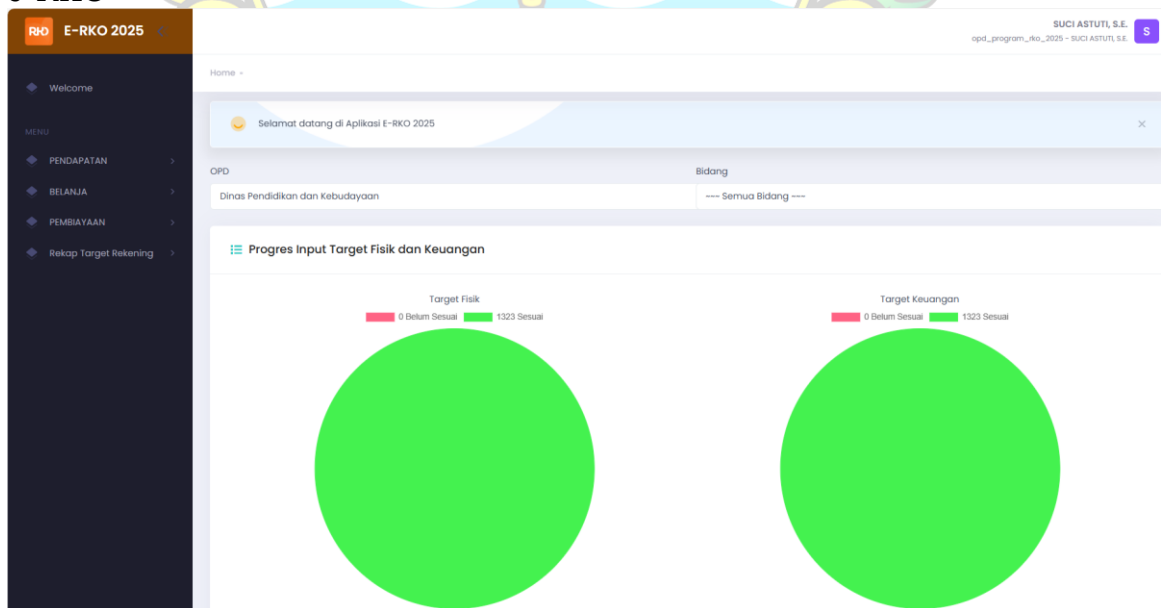
b. e-budgeting



Gambar 2.5.2 : Tampilan aplikasi e-budgeting.jatengprov.go.id

Aplikasi ini digunakan untuk menyusun rincian anggaran secara lebih detail sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan di masing – masing sub kegiatan.

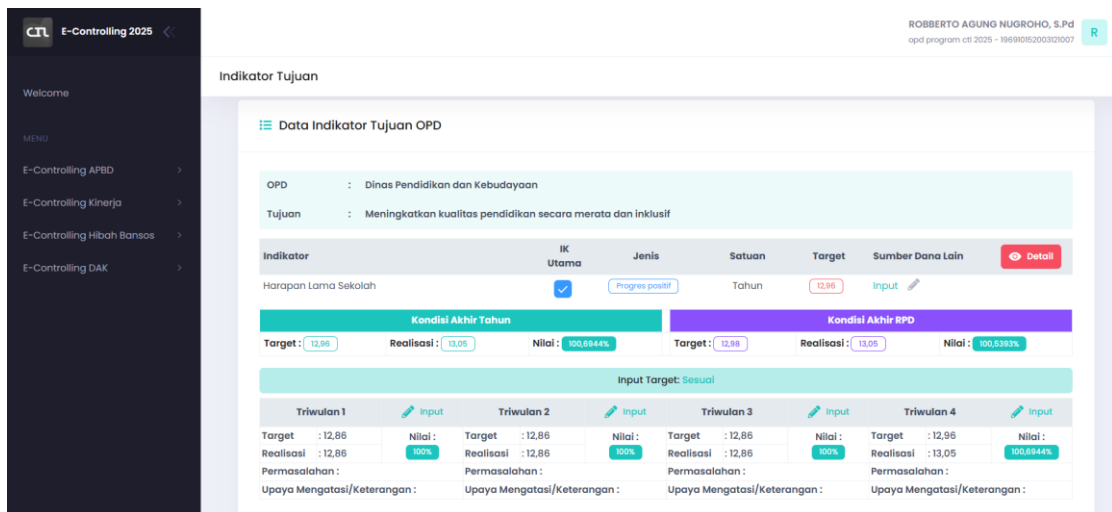
c. e-RKO



Gambar 2.5.3 : Tampilan aplikasi e-RKO.jateng.go.id

Aplikasi ini digunakan untuk menyusun jadwal rencana aksi per sub kegiatan.

d. e-controlling.



Gambar 2.5.4 : Tampilan aplikasi e-controlling.jatengprov.go.id

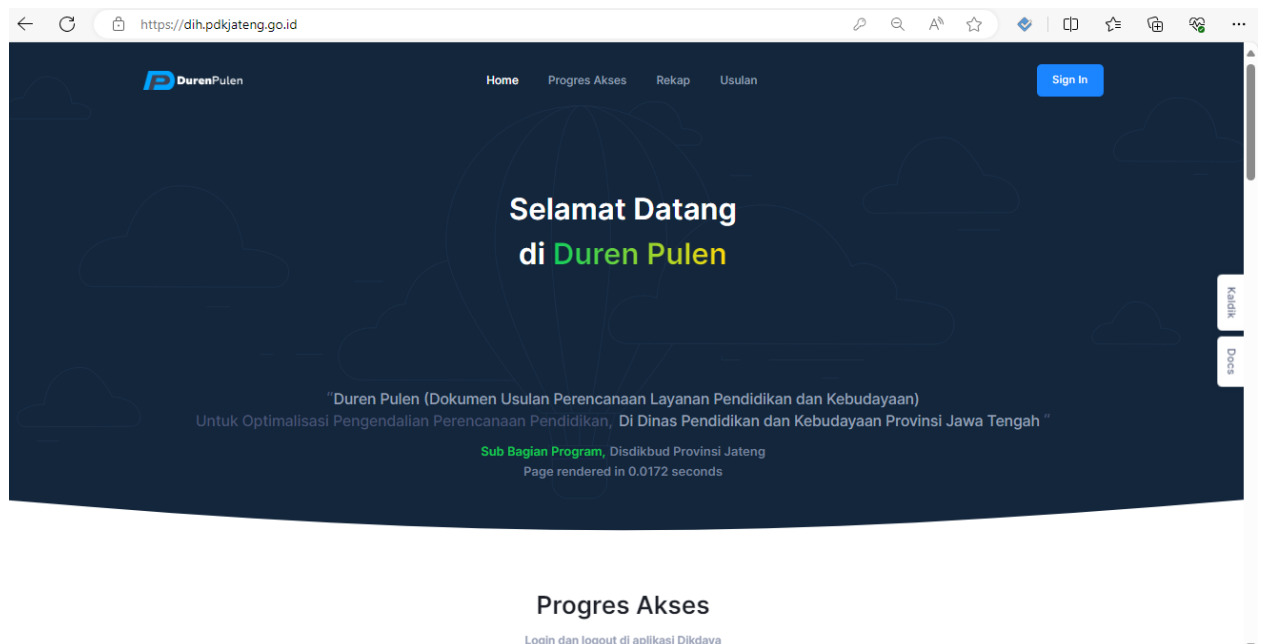
Aplikasi ini digunakan untuk pengendalian anggaran yang dievaluasi setiap bulan serta indikator kinerja yang dievaluasi setiap triwulan. Selain menggunakan instrument di atas, secara internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melaksanakan Desk Capaian Indikator Kinerja Triwulan II dan Triwulan IV. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian kinerja yang telah di inputkan dalam aplikasi econtroning diyakini kebenarannya. Melalui desk indikator kinerja masing – masing unit kerja bisa menyajikan data dukung dari masing – masing capaian kinerja yang telah diinput dalam aplikasi e-controlling.

Selain aplikasi dari GRMS Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mempunyai aplikasi yang dikembangkan oleh Disdikbud dalam menunjang kinerja antara lain :

a. Duren Pulen (Dokumen Usulan Perencanaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan)

Merupakan aplikasi yang digunakan untuk menampung usulan perencanaan baik usulan anggaran maupun usulan kinerja, aplikasi duren pulen dapat diakses melalui <https://dih.pdkjateng.go.id/>. Usulan yang telah masuk Duren Pulen nantinya akan menjadi bahan untuk input pada aplikasi E-Planing Provinsi Jawa Tengah.

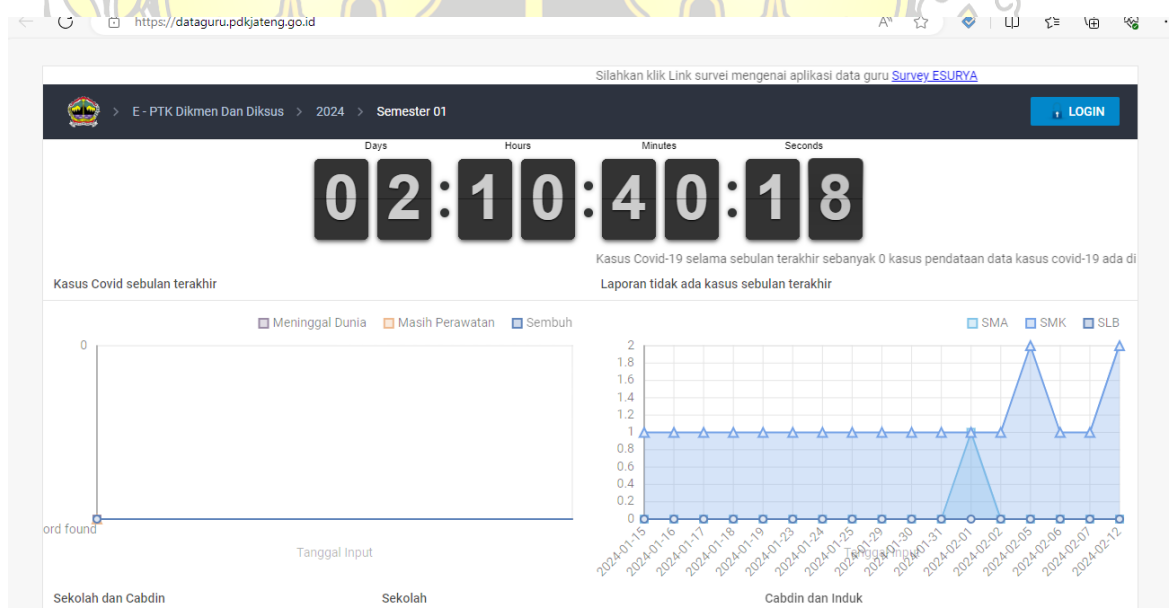
Berikut tampilan dari aplikasi duren pulen



Gambar 2.5.5 : Tampilan aplikasi duren pulen

b. E-Data guru

Aplikasi ini digunakan untuk verval pencairan TPG (Tambahan Pendapatan Guru) dan Tamsil (Tambahan Penghasilan), adapapun aplikasi ini dapat di akses melalui <https://dataguru.pdkjateng.go.id/> Berikut tampilan aplikasi data guru sebagai berikut :



Gambar 2.5.6 : Tampilan aplikasi data guru.pdkjateng.go.id

c. E-GTT/PTT

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk pendataan gtt dan ptt jenjang sma, smk, dan diksus serta penghitungan pembayaran gtt dan ptt setiap bulannya. Data GTT/PTT yang ada di aplikasi ini akan di gunakan sebagai dasar pemberian BOP SMA/SMK/SLB pada satuan pendidikan. Aplikasi ini dapat diakses melalui <https://dataguru.pdkjateng.go.id/gttptt/>

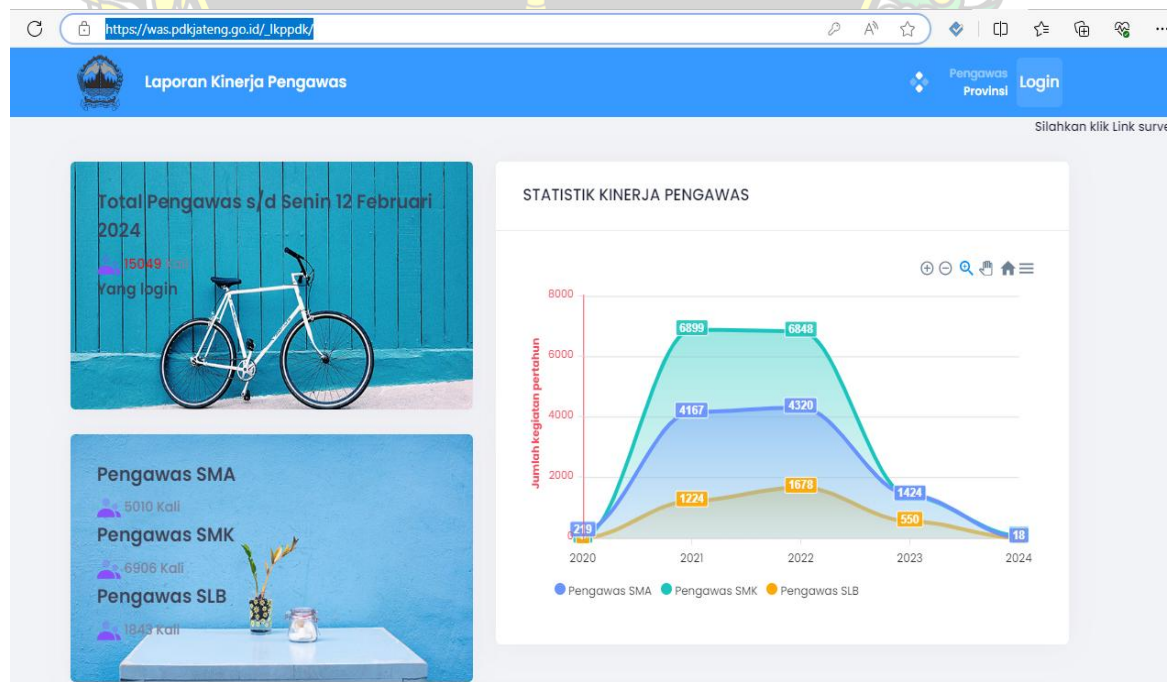
Rekap Data Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

N	Kabupaten/Kota	PPPK	Guru Tidak Tetap (GTT)											
			APBD		PSM		BOS		BOP		PLA		Lainnya	
			≥ 24 Jam	< 24 Jam	≥ 24 Jar	< 24 Jar	≥ 24 Jar	< 24 Jar	≥ 24 Jam	< 24 Jam	≥ 24 Jar	< 24 Jar	≥ 24 Jar	< 24 Jar
1	Kota Semarang	6	107	7	0	0	0	0	3	1	0	0	2	0
2	Kabupaten Semarang	0	89	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	Kabupaten Kendal	0	75	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	Kabupaten Grobogan	11	76	9	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
5	Kabupaten Demak	0	123	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Kota Salatiga	0	33	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kabupaten Pati	0	106	31	0	0	0	0	3	1	0	0	1	5
8	Kabupaten Kudus	0	69	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kabupaten Jepara	0	131	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kabupaten Rembang	0	73	12	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
11	Kabupaten Blora	0	63	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
12	Kota Surakarta	4	62	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
13	Kabupaten Boyolali	0	113	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
14	Kabupaten Klaten	0	123	18	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
15	Kabupaten Sukoharjo	0	58	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
16	Kabupaten Wonogiri	0	109	17	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2

Gambar 2.5.7 : Tampilan aplikasi e-gtpttt.pdkjateng.go.id

d. Laporan Kinerja Pengawas (LKP)

Merupakan Sistem informasi Laporan Kinerja Pegawai dan Pengawas di dinas pendidikan dan kebudayaan. Aplikasi ini mempermudah dalam menghimpun laporan kinerja yang telah dibuat oleh pengawas sekolah di masing – masing wilayah tempat kedudukan. Aplikasi ini dapat di akses melalui https://was.pdkjateng.go.id/_lkppdk/. Adapun tampilan aplikasi seperti gambar di bawah ini.



Gambar 2.5.8 : Tampilan aplikasi LKP (was.pdkjateng.go.id)

e. Aplikasi SMPB Jateng



Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk seleksi penerimaan murid baru yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Aplikasi ini dibangun sebagai bentuk integritas dan kemudahan layanan masyarakat di bidang pendidikan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Tinggi : > 91%;
- b. Tinggi : 76 – 90,99%;
- c. Sedang : 66 – 75,99%;
- d. Rendah : 51 - 65,99%;
- e. Sangat Rendah : < 50,00%.

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menyediakan alat ukur, dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran. Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPD
				Target	Realisasi	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	%	53,82	53,85	100,0557%	55,32
1.1.	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	%	16.89	19.67	116.4594%	17,89



No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPD
				Target	Realisasi	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	%	23.44	26.21	111.8174%	24,44
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	%	31,7	31,74	100,1262%	35,17
2	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan iklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,14	8,15	100,1229%	8,20
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,96	13,05	100,6944%	12,98
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	%	83.29	82.71	99.3036%	83,60
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	%	85.94	68.84	80.1024%	86,44
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	%	67.25	82.71	122.9888%	68,42
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	%	70.97	71.6	100.8877%	71,02
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di pernagkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	75,07	77,82	103,6632%	75,57
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,18	3,01	94,65 %	3,45
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,2	3,31	103,44 %	3,30

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai 3 Tujuan dengan 4 indikator, indikator tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Masuk dalam kategori **Sangat Tinggi** adapun ketberhasilan tersebut dicapai dengan melakukan berbagai upaya antara lain :

- a) Dalam rangka peningkatan partisipasi budaya masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan berbagai macam kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung salah satunya yaitu gelar budaya yang dilaksanakan di Banyumas, Festival Cagar

Budaya di Benteng Willem Ambarawa serta parade Seni Budaya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, selain mengenalkan masyarakat dengan budaya Jawa Tengah melalui kegiatan tersebut juga tercipta ekosistem dimana ada pergerakan ekonomi masyarakat, sehingga selain peningkatan partisipasi budaya kegiatan tersebut juga secara tidak langsung menggerakkan perekonomian masyarakat;

- b) Meningkatnya kualitas pendidikan secara merata dan inklusif dilakukan melalui berbagai macam inovasi pendidikan, melalui pemerataan akses (pembangunan USB pada wilayah blank spot, rehabilitasi sarpras pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi rusak berat), peningkatan digitalisasi pendidikan dengan pemenuhan sarprasnya (pengadaan alat TIK), serta pembiayaan pendidikan dengan pemberian BOP, BOSDA, Seragam Siswa Miskin, Pemberian Bantuan Siswa Miskin dan ATS, serta program kemitraan dengan swasta. Melalui kegiatan tersebut secara tidak langsung berdampak pada naiknya nilai RLS dan HLS di Jawa Tengah;
- c) Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan salah satunya telah dibentuknya tim Reformasi Birokrasi yang bisa mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

Indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8 sasaran dengan jumlah indikator kinerjanya sebanyak 9 indikator dengan ketercapaiannya masuk kategori sebagai berikut :

- a) **Sangat Tinggi** sebanyak 7 indikator yaitu : Persentase karya budaya berperingkat nasional, Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan, Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani, APK SMA, SMK dan SLB, Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah, Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th, Indeks Kepuasan Masyarakat
- b) **Tinggi** sebanyak 2 indikator yaitu : Nilai karakter siswa sekolah menengah, dan Indeks Manajemen Risiko

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.2

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	53,82	53,85	100,0557%	Sangat Tinggi	E-Controlling
1.1.	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	16.89	19.67	116.4594%	Sangat Tinggi	E-Controlling
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	23.44	26.21	111.8174%	Sangat Tinggi	E-Controlling
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	31,7	31,74	100,1262%	Sangat Tinggi	E-Controlling
2	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan iklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	8,14	8,15	100,1229%	Sangat Tinggi	E-Controlling
		Harapan Lama Sekolah	12,96	13,05	100,6944%	Sangat Tinggi	E-Controlling
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	83.29	82.71	99.3036%	Sangat Tinggi	E-Controlling
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	85.94	68.84	80.1024%	Tinggi	E-Controlling
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	67.25	82.71	122.9888%	Sangat Tinggi	E-Controlling
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	70.97	71.6	100.8877%	Sangat Tinggi	E-Controlling
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan	Indeks Reformasi Birokrasi	75,07	77,82	103,6632%	Sangat Tinggi	E-Controlling

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	reformasi birokrasi di perangkat daerah	(Perangkat Daerah)					
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,18	3,01	94,65 %	Tinggi	E-Controlling
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,2	3,31	103,44 %	Sangat Tinggi	E-Controlling

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun).

Tahun 2023 - 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengalami 2 periode renstra yaitu periode Renstra 2018 – 2023 dan Renstra 2014 – 2026. Dalam periode rentra tersebut indikator tujuan dan sasaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami beberapa perubahan karena terdapat beberapa indikator setelah dievaluasi sudah tidak sesuai atau kurang mengukur outcome dari program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun ada satu indikator sasaran yang masing digunakan pada renstra periode 2024 – 2026 yaitu indikator APK SMA/SMK/SLB. Pada indikator APK SMA/SMK/SLB tahun 2023 belum mencapai target dikarenakan masih terdapat anak usia sekolah pada daerah tertentu bersekolah di luar wilayah kabupaten/kota karena mengikuti kepindahan orang tua bekerja Anak usia sekolah menengah bersekolah di madrasah atau mengikuti program kejar paket C . Sedangkan pada tahun 2024 APK SMA,SMK,SLB mencapai target dengan capaian 101,4% Adapun hal – hal yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yaitu melalui pemberian pembiayaan Pendidikan yang terjangkau, peningkatan sarpras Pendidikan, serta pemetaan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

Tahun 2024 - 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai 3 tujuan dengan 4 indikator, capaian indikator tujuan

2025 antara lain sebagai berikut :

- a. Angka Melek Budaya dengan capaian kinerja sebesar 100.0557. Adapun Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja dengan melakukan pembinaan kesenian dan peletarian kesenian tardisional serta mengenalkan kebudayaan dan kesenian dalam Masyarakat seperti membuka ruang ekspresia budaya Masyarakat.
- b. Rata – rata lama sekolah dengan capaian kinerja sebesar 100.1229% dan Harapan lama sekolah dengan capaian 100.6944%. RLS dan HLS merupakan indicator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari segi dimensi pengetahuan. Kedua indicator tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan RLS dan HLS menunjukan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
- c. Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian sebesar 103.6632%, indeks reformasi birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ketercapaian tersaebut terjadi karena berfungsinya tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 serta telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik serta pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026 ada 8 dengan jumlah indikator sasaran yaitu sebanyak 9 indikator kinerja. Capaian indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah diuraikan denan penjelasan sebagai berikut :

- a. Persentase karya budaya berperingkat nasional dengan capaian sebesar 116.4594% dikarenakan adanya kenaikan jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan nasional;
- b. Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan dengan capaian kinerja sebesar 111.8174% dikarenakan terdapat beberapa cagar budaya di Jawa Tengah telah diakui sebagai Cagar Budaya Tingkat Nasional;

- c. Persentase SDM dan Lembaga kebudayaan yang dilayani dengan capaian kinerja sebesar 100.1262%, hal ini karena tahun 2025 peningkatan SDM kebudayaan dilakukan melalui berbagai intervensi mulai dari peningkatan untuk Lembaga kebudayaan di intervensi melalui pemberian dana hibah serta pemberian apresiasi kepada budayawan atau tokoh budaya di Jawa Tengah;
- d. APK SMA, SMK, SLB dengan capaian kinerja sebesar 99.3036% adapun hal – hal yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yaitu melalui pemberian pembiayaan Pendidikan yang terjangkau, peningkatan sarpras Pendidikan, serta pemetaan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Nilai karakter siswa dengan capaian kinerja sebesar 80.1024% . Nilai karakter di Jawa Tengah turun dibandingkan tahun lalu dikarenakan rendahnya kesadaran siswa tentang pentingnya nilai-nilai moral sehingga masih ditemukan banyak kasus bullying dan tawuran siswa. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan integrasi pendidikan karakter ke dalam kurikulum agar siswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Rata – rata literasi dan numerasi sekolah menengah dengan capaian kinerja sebesar 122.9888% dikarenakan meningkatnya kualitas pembelajaran siswa, Adapun intervensi kegiatan yang telah dilakukan antara lain dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta pembiayaan yang terjangkau (pembiayaan Pendidikan bebas pungutan) sehingga siswa lebih fokus dalam proses belajar;
- g. Angka Partisipasi sekolah usia 16 – 18 th dengan capaian kinerja sebesar 100.8877% dikarenakan adanya kebijakan – kebijakan terkait pembiayaan Pendidikan sehingga partisipasi Masyarakat untuk mengenyam Pendidikan meningkat;
- h. Indeks Manajemen Risiko dengan capaian kinerja sebesar 92.0732% belum tercapai salah satu factor yang mempengaruhi antara lain belum teridentifikasinya resiko strategis terkait dengan pemertaan akses Pendidikan salah satunya yaitu relokasi/mutasi guru PPPK;
- i. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 105.2308% telah tercapai dikarenakan pelayanan yang dilaksanakan di

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk rincian target dan realisasi indikator tujuan dan sasaran secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.





Tabel 3.3
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian %
Renstra 2018 - 2023											
1	Perluasan akses dan peningkatana mutu layanan Pendidikan SMA/SMK/SB	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	8.75	9.95	87.93	-	-	-	-	-	-
1.1	Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja	APK SMA/SMK/SLB	85.1	83.65	98.29	-	-	-	-	-	-
		Presentase sarpras SMA, SMK, SLB sesuai standar	83.95	92.78	110.51	-	-	-	-	-	-
		Presentase guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi akademis	99.5	99.5	100,00	-	-	-	-	-	-
		Rasio guru terhadap Rombongan belajar pada SMA/SMK/SLB	0,07	0,07	100	-	-	-	-	-	-
2	Penguatan karakter dan ketahanan budaya	Angka Partisipasi Seni Budaya	12,00	12,00	100	-	-	-	-	-	-
2.1	Meningkatnya pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan local) dan ketahanan budaya	Persentase jenis budaya terlayani	6.82	6.82	100	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	98	98.02	100.02	-	-	-	-	-	-
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	98	98.02	100.02	-	-	-	-	-	-
3.2	Meningkatknya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	78	79.35	101.73	-	-	-	-	-	-



NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Renstra 2024 - 2026											
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	-	-	-	52,32	52,61	100,55	53,82	53,85	100,0557
1.1	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	-	-	-	15,89	17,62	110,89	16.89	19.67	116.4594
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	-	-	-	22,44	23,45	104,50	23.44	26.21	111.8174
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	-	-	-	28,23	28,25	100,07	31,7	31,74	100,1262
2	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan iklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	-	-	-	8,08	8,02	99,26	8,14	8,15	100,1229
		Harapan Lama Sekolah	-	-	-	12,94	12,86	99,38	12,96	13,05	100,6944
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA/SMK/SLB	-	-	-	82,92	84,08	101,40	83.29	82.71	99.3036
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	-	-	-	85,44	69,26	81,06	85.94	68.84	80.1024
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	-	-	-	66,08	69,72	105,51	67.25	82.71	122.9888
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	-	-	-	70,93	71,60	100,94	70.97	71.6	100.8877
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di pernagkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	-	-	-	74,57	63,17	84,71	75,07	77,82	103,6632
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	3,18	3,01	94,65	3,18	3,01	94,65
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	3,2	3,31	103,44	3,2	3,31	103,44

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD Tahun 2026

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	53,85	55,32	97,3427
1.1.	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	19.67	17,89	109,9497
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	26.21	24,44	107,2422%
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	31,74	35,17	90,2474
2	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	8,15	8,14	99,3902
		Harapan Lama Sekolah	13,05	12,98	100,5393
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	82.71	83,60	98,9354
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	68.84	86,44	79,6391
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	82.71	68,42	120,8857
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	71.6	71,02	100,8167
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perngkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	77,82	75,57	102,9774
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,01	3,45	87,5362
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,30	103,6364

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.5
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Nasional	%Capaian
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	53,85	-	-
1.1	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	19.67	-	-
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayani	26.21	-	-
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	31,74	-	-
2	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	8,15	9,07	89,8566
		Harapan Lama Sekolah	13,05	13,30	98,1203
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	82.71	-	
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	68.84	-	
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	82.71	-	
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	71.6	74.64	95,93
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perngkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	77,82	-	
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,01	-	
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	-	

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	53,82	53,85	100,0557%	-	-
1.1.	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	16.89	19.67	116.4594%	adanya kenaikan jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan nasional	-
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayani	23.44	26.21	111.8174%	-	-
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	31,7	31,74	100,1262%	Pemberian bantuan untuk peningkatan kapasitas pekerja seni dan kelompok seni di Jawa Tengah	-
2	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	8,14	8,15	100,1229%	Inovasi perluasan akses dan pembiayaan pendidikan berdampak pada peningkatan angka RLS	-
		Harapan Lama Sekolah	12,96	13,05	100,6944%	Inovasi perluasan akses dan pembiayaan pendidikan berdampak pada peningkatan angka RLS	-
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	83.29	82.71	99.3036%	Intervensi program melalui pemberian pembiayaan pendidikan yang terjangkau, peningkatan sarpras Pendidikan, serta pemetaan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	-
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	85.94	68.84	80.1024%	Sistem pelayanan pendampingan kejadian terkait	Pendampingan dan sosialisasi kepada satuan



No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap gender, fisik, agama, suku, dan budaya masih rendah	Pendidikan khususnya bagi Tim Penanganan Tindak Kekerasan yang ada pada satuan pendidikan
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	67.25	82.71	122.9888%	meningkatnya kualitas pembelajaran siswa, Adapun intervensi kegiatan yang telah dilakukan antara lain dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta pembiayaan yang terjangkau (pembiayaan Pendidikan bebas pungutan) sehingga siswa lebih focus dalam proses belajar	-
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	70.97	71.6	100.8877%	dikarenakan adanya kebijakan – kebijakan terkait pembiayaan Pendidikan sehingga partisipasi Masyarakat untuk mengenyam Pendidikan meningkat	-
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perngkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	75,07	77,82	103,6632%	Terbentuknya tim RB berdampak pada tingkat pengendalian reformasi birokrasi pada perangkat	-
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,18	3,01	94,65 %	Belum tercapai salah satu factor yang mempengaruhi antara lain belum teridentifikasinya resiko strategis terkait dengan pemertaan akses Pendidikan salah satunya yaitu relokasi/mutase guru PPPK	Melakukan identifikasi serta penilaian risiko mulai dari risiko startegis d sampai dengan operasional dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Pengelola Risiko
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,2	3,31	103,44 %	Pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan	-

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber dana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa sasaran dengan tingkat efisiensinya lebih dari 10% diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) APK SMA, SMK, SLB terjadi efisiensi sebesar 15,18% hal ini dikarenakan terdapat belanja hibah yaitu Bosda kemitraan yang tidak tersalur dikarenakan penyaluran menyesuaikan dengan jumlah siswa hasil seleksi SPMB Tahun 2025/2026, selain penyaluran hibah kegiatan yang tidak terserap dari sisi anggaran antara lain paket pekerjaan rehabilitasi ruang kelas pada satuan pendidikan, beberapa paket pekerjaan belum selesai yaitu sebanyak 2 paket rehab SMA dan SMK;
- b) Nilai karakter siswa sekolah menengah terjadi efisiensi sebesar 12,53% dikarenakan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus terdapat efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas dan makan minum rapat karena adanya perubahan skema kegiatan yang semula direncanakan luring dirubah menjadi daring.

Untuk lebih jelas capaian realisasi kinerja dan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.7
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian%	Anggaran	Realisasi	Capaian (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	53,82	53,85	100,0557%	33.347.185.000,00	32.244.547.560,00	96,69	3,31
1.1.	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	16,89	19,67	116,4594%	7.316.432.000	7.007.418.600	95,78	4,22
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	23,44	26,21	111,8174%	2.730.686.000	2.606.978.360	95,47	4,53
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	31,7	31,74	100,1262%	23.300.067.000	22.630.150.600	97,12	2,88
2	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	8,14	8,15	100,1229%	3.325.496.585.000	3.228.094.827.786	97,07	2,93
		Harapan Lama Sekolah	12,96	13,05	100,6944%				
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	83,29	82,71	99,3036%	450.312.952.000	381.939.235.165	84,82	15,18
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	85,94	68,84	80,1024%	458.646.000	401.193.925	87,47	12,53
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	67,25	82,71	122,9888%	2.874.724.987.000	2.845.754.398.696	98,99	1,01
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	70,97	71,6	100,8877%	38.328.168.000	35.965.233.871	93,83	6,17



No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian%	Anggaran	Realisasi	Capaian (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perngkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	75,07	77,82	103,6632%	5.241.010.512.000	4.990.096.480.372	95,21	4,79
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,18	3,01	94,65 %	64.558.315.000	63.221.595.600	97,93	2,07
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,2	3,31	103,44 %	5.176.452.197.000	4.926.874.884.772	95,18	4,82

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8
Analisis Program /Kegiatan Penunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
1	Meningkatkan Kualitas pendidikan secara merata dan iklusif	Rata - Rata Lama Sekolah	100,1229%				
		Harapan Lama Sekolah	100,6944%				
1.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	99.3036%				
1.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	80.1024%				



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
		Nilai karakter siswa sekolah menengah	122.9888%				
1.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	100.8877%				
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
					Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	96,3444	Menunjang
					Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	85	Menunjang
					Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	99,9494	Menunjang
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	13,0357	Menunjang
					Persentase angka putus sekolah SMA	876,9231	Menunjang
					Persentase angka putus sekolah SMK	4,2105	Menunjang
					Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	98,7974	Menunjang
					Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	131,6667	Menunjang
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	98,2319	Menunjang



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	99,6697	Menunjang
					Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	103,1789	Menunjang
					Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	95,2941	Menunjang
					Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	415,7	Menunjang
					Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	84,6289	Menunjang
					Persentase angka putus sekolah SLB	207,7922	Menunjang
					Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	100	Menunjang
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	100	Menunjang



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	100	Menunjang
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	107,3333	Menunjang
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	95,8189	Menunjang
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	137,1067	Menunjang
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	82,7954	Menunjang
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	0	Menunjang
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	100	Menunjang
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	133,0526	Menunjang
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	104,0019	Menunjang



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	101,8599	Menunjang
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	95,7523	Menunjang
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	57,3333	Menunjang
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	98,4561	Menunjang
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	387,0466	Menunjang
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	83,2362	Menunjang
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	88,8677	Menunjang
					APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	101,0228	Menunjang
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	122,25	Menunjang
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	89,5161	Menunjang



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	522,5455	Menunjang
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	100,9596	Menunjang
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	154,1735	Menunjang
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	100,0129	Menunjang
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	98,8506	Menunjang
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	117,2731	Menunjang
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	117,4545	Menunjang
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	99,1676	Menunjang
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	99,9631	Menunjang
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	106,9178	Menunjang



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	47,7823	Menunjang
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	98,7437	Menunjang
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	96,1652	Menunjang
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	53,5124	Menunjang
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	100	Menunjang
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	69,2308	Menunjang
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	97,5904	Menunjang
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	92,4816	Menunjang
					APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	91,525	Menunjang
					Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	170,3557	Menunjang



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	100	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	99,3747	Menunjang
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	98,5316	Menunjang
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	98,3884	Menunjang
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	97,6176	Menunjang
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	99,8987	Menunjang
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	98,8275	Menunjang
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	99,6194	Menunjang
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	99,3522	Menunjang
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	99,2009	Menunjang
					Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	100,0614	Menunjang
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	96,9201	Menunjang
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	98,1585	Menunjang



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	98,683	Menunjang
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
					Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	100	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
					Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	15	Menunjang
					Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	104,0938	Menunjang
					Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	100	Menunjang
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	100	Menunjang
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	100	Menunjang
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	108,0667	Menunjang



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	74,0667	Menunjang
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	80	Menunjang
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	50	Menunjang
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	66,67	Menunjang
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	4	Menunjang
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	104	Menunjang
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	199,631	Menunjang
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	98,9496	Menunjang



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	100	Menunjang
					Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	0	Menunjang
2	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	100,0557%				
2.1	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	116.4594%				
2.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan	111.8174%				
2.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	100,1262%				
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
					Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	106,8493	Menunjang
					Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	100	Menunjang



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	100	Menunjang
					Persentase cakupan pelestarian seni	100	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
					Tingkat partisipasi seni tradisi	100	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
					Persentase akses literasi sejarah	100	Menunjang
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
					Persentase cagar budaya berperingkat nasional	103,4221	Menunjang
					Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	104,0404	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
					Nilai survey kepuasan pengunjung museum	100,0444	Menunjang
3	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perngkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	103,6632%				
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	94,65 %				
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,44 %				



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
					Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang



NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	MENUNJANG / TIDAK MENUNJANG
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengampu 3 (tiga) urusan yaitu urusan pendidikan, urusan kebudayaan dan urusan penunjang pemerintah daerah. Program yang mendukung / menunjang Urusan pendidikan terdiri dari empat program, diantaranya **Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.** Total indikator urusan pendidikan sebanyak 87 indikator dengan rincian tingkat capaian adalah sebagai berikut: Tingkat ketercapaian sangat tinggi sebanyak 67 indikator, tingkat ketercapaian tinggi sebanyak 7 indikator, tingkat ketercapaian sedang sebanyak 3 indikator, tingkat ketercapaian rendah sebanyak 2 indikator dan tingkat ketercapaian Sangat Rendah sebanyak 8 indikator.

Dalam mewujudkan pembangunan urusan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, didukung anggaran Rp3 3.363.824.753.000,00 untuk melaksanakan 4 program, yaitu:

Program Pengelolaan Pendidikan didukung anggaran Rp3.361.891.269.000,00 dengan realisasi fisik 99,95% dan keuangan 97,04%. Program ini memiliki 57 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian 44 sangat tinggi antara lain APK SMA, APK SMK dan APK SLB; Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB; Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikasi kompetensi. 6 tinggi antara lain: Rasio ruang kelas:rombongan belajar SMA; Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, 1 sedang pada Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK,dan SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, 2 rendah pada Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK,dan SLB pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan IV serta 4 sangat rendah antara lain: Persentase capaian prestasi peserta didik pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, II, hal ini disebabkan karena cabang dinas tersebut tidak mendapatkan penghargaan dalam perlombaan akademik dan non-akademik tingkat provinsi. Bidang pembinaan SMK; Persentase angka putus sekolah SMK pada Bidang Pembinaan SMK, hal ini disebabkan karena siswa SMK lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Terhadap target akhir RPD terdapat 29 Indikator telah tercapai, 15 indikator akan tercapai dan 13 Indikator perlu upaya keras. Permasalahan yang dihadapi yaitu Blank Spot (Kecamatan yang belum ada SMA, SMK dan SLB Negeri). Upaya yang

dilakukan antara lain Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan rombongan belajar. Manfaat pelaksanaan program ini adalah meningkatnya partisipasi pendidikan melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan

Program Pengembangan Kurikulum didukung anggaran Rp458.646.000,00 dengan realisasi fisik 100,00% dan keuangan 87,47%, terkait dengan realisasi keuangan hal ini disebabkan karena penyusunan kompetensi dasar/capaian pembelajaran muatan lokal pendidikan menengah dan khusus dapat digabungkan sesuai dengan kondisi topologi daerah. Program ini memiliki 13 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi. Terhadap target RPD, terdapat 13 indikator akan tercapai. Permasalahan yang dihadapi antara lain belum meratanya kapasitas pendidik dalam memahami dan mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik, dan belum meratanya implementasi kurikulum di satuan Pendidikan. Upaya yang dilakukan yaitu: peningkatan kompetensi pendidik melalui bimbingan teknis dan pendampingan, penyusunan serta penyempurnaan dokumen kurikulum satuan Pendidikan dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Manfaat pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kualitas pembelajaran.

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, didukung anggaran Rp.851.994.000,00 dengan realisasi fisik 100,00% dan keuangan 93,48%, terkait dengan Realisasi keuangan hal ini disebabkan beberapa kegiatan pendistribusian guru melalui koordinasi dengan pusat/BKN dilaksanakan secara daring dikarenakan keterbatasan waktu untuk tatap muka. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri). Terhadap target RPD indikator tersebut akan tercapai. Permasalahan yang dihadapi yaitu: belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan antar satuan pendidikan, ketimpangan jumlah jam mengajar dan jumlah guru di beberapa sekolah, keterbatasan pemenuhan kebutuhan guru mata pelajaran produktif serta adanya ketidakseimbangan pertumbuhan guru. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan distribusi guru dan tenaga kependidikan melalui pendekatan domisili mengusulkan penambahan formasi pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, pemenuhan guru produktif melalui skema guru tamu, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemerataan dan peningkatan kualitas SDM pendidikan. Manfaat pelaksanaan program ini adalah meratanya guru melalui optimalisasi jumlah jam mengajar, meningkatnya efektivitas

proses pembelajaran, terjaminnya layanan pendidikan yang adil dan merata, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan sesuai target RKPD.

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, didukung anggaran Rp.622.844.000,00 dengan realisasi fisik 100,00% dan keuangan 94,31%, terkait dengan realisasi keuangan hal ini disebabkan karena berkas/dokumen yang diusulkan sudah sesuai dengan syarat usulan perizinan sehingga tidak perlu peninjauan berulang. Program ini memiliki 16 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian 9 sangat tinggi yaitu Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMK, Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus, dan Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB Cabdin I,II,III,IX,X,XI,XII; 1 indikator tinggi yaitu Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB Cabdin V; 2 indikator sedang yaitu Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB Cabdin IV dan VII; serta 4 indikator sangat rendah yaitu Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB Cabdin VI, VIII, XIII dan Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA hal ini disebabkan oleh usulan perizinan yang diusulkan oleh masyarakat tidak berada di wilayah Blankspot Pendidikan. Terhadap target akhir RPD terdapat 5 indikator yang tercapai, 4 indikator akan tercapai, 7 indikator perlu Upaya keras. Permasalahan yang dihadapi antara lain: minat masyarakat mendirikan satuan pendidikan pada wilayah blank spot rendah. Upaya yang dilakukan antara yaitu: mendorong masyarakat (Yayasan pendidikan) untuk berpartisipasi dalam pendirian USB di wilayah blank spot. Manfaat pelaksanaan program ini adalah meningkatnya akses layanan pendidikan melalui terselenggaranya satuan pendidikan yang memiliki legalitas sesuai ketentuan, terjaminnya mutu dan standar penyelenggaraan pendidikan, meningkatnya kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan, serta mendukung pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah.

Dalam melaksanakan urusan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, didukung anggaran Rp33.347.185.000,00 untuk melaksanakan 5 Program yaitu :

Program Pengembangan Kebudayaan, didukung anggaran Rp6.227.041.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 94,31%. Program ini memiliki 4 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu persentase Objek Pemajuan Kebudayaan berperingkat nasional, tingkat partisipasi pemeringkatan Objek Pemajuan

Kebudayaan, persentase akses pengembangan SDM kebudayaan, dan persentase cakupan pelestarian seni. Terhadap target akhir RPD terdapat 2 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai.

Permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya upaya pembinaan lembaga dan SDM kebudayaan. Upaya yang dilakukan yaitu fasilitasi pembinaan lembaga dan SDM kebudayaan melalui ruang ekspresi budaya. Manfaat pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga warisan budayanya, adat dan tradisi yang hampir punah dapat bergiat kembali, dan terbukanya ruang kreasi bagi seniman.

Program Pengembangan Kesenian Tradisional, didukung alokasi anggaran Rp22.786.072.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,28%. Program ini memiliki 1 indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu tingkat partisipasi seni tradisi. Terhadap target akhir RPD terdapat 1 indikator akan tercapai.

Permasalahan yang dihadapi yaitu, kurangnya ruang ekspresi/event untuk berkesenian serta sarana dan prasarana berkesenian. Upaya yang dilakukan yaitu, penyediaan ruang ekspresi/event untuk penyelenggaraan event berkesenian, serta memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk kegiatan seni. Manfaat pelaksanaan program ini antara lain termotivasinya seniman dan pelaku seni budaya untuk menampilkan dan mengembangkan hasil karyanya, meningkatkan minat dalam berkesenian serta terfasilitasinya kegiatan berkesenian bagi pelaku seni, sehingga kesenian tradisional dapat lestari dan berkembang.

Program Pembinaan Sejarah, alokasi anggaran Rp574.051.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 90,19%. Program ini memiliki 1 indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu persentase akses literasi sejarah. Terhadap target RPD terdapat 1 indikator akan tercapai.

Permasalahan yang dihadapi yaitu, kurangnya literasi sejarah. Upaya yang dilakukan yaitu, menambah literasi sejarah dengan meningkatkan penulisan sejarah. Manfaat Program Pembinaan Sejarah antara lain tumbuhnya rasa bangga terhadap sejarah bangsa secara umum dan daerah secara khusus dan literasi tentang sejarah semakin meningkat.

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, alokasi anggaran Rp857.240.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 92,98%. Program ini memiliki 2 indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian

sangat tinggi, yaitu persentase Cagar Budaya berperingkat nasional dan tingkat partisipasi pemeringkatan Cagar Budaya. Terhadap target RPD terdapat 1 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai.

Permasalahan yang dihadapi adalah adanya perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Kebudayaan yang berdampak pada pengusulan Cagar Budaya peringkat nasional. Upaya yang dilakukan berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam pemenuhan dokumen sesuai kebijakan tersebut. Manfaat Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya antara lain meningkatnya Cagar Budaya Jawa Tengah yang memiliki status sebagai Cagar Budaya peringkat nasional, meningkatnya Cagar Budaya yang terlindungi secara hukum melalui penetapan dan pemeringkatan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan Cagar Budaya.

Program Pengelolaan Permuseuman, alokasi anggaran Rp2.902.781.000,00 dengan realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan 99,60%. Program ini memiliki 1 indikator yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu nilai survey kepuasan pengunjung museum. Terhadap target RPD terdapat 1 target telah tercapai.

Permasalahan yang dihadapi antara lain, belum optimalnya museum dalam menarik pengunjung terutama dari generasi muda, kurangnya tenaga profesional pemuseuman seperti kurator, edukator, dan restorator. Upaya yang dilakukan antara lain, menjalin kerjasama dengan stakeholder pendidikan terutama perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian, praktek kerja lapangan, dan kegiatan bersama lainnya serta dengan meningkatkan kapasitas SDM yang ada untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi teknis permuseuman. Manfaat Program Pengelolaan Permuseuman antara lain meningkatnya tata Kelola museum melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan koleksi secara terpadu; peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum; dan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana museum.

Urusan penunjang urusan terdiri dari 1 (satu) program yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,** tingkat ketercapaian Sangat Tinggi sebanyak 18 indikator. Faktor yang mempengaruhi ketercapaian ini adalah adanya peningkatan layanan perangkat daerah dalam memberikan layanan kepegawaian dan pengadministrasian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



3.2 Realisasi Anggaran

Keterserapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 sebesar 95,93% dari total anggaran yang dialokasikan. Dimana, anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 8.638.182.450.000 ,- adapun realisasinya sebesar Rp. 8.286.401.089.589,-. Besaran alokasi dan realisasi anggaran per program dan kegiatan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.638.182.450.000	8.286.401.089.589	95,93
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.241.010.512.000	4.990.096.480.372	95,21
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.558.315.000	63.221.595.600	97,93
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	857.454.000	798.449.273	93,12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	252.611.000	227.994.600	90,26
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.707.041.000	7.220.391.119	93,69
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.650.745.000	21.473.361.694	87,11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.867.016.000	43.082.348.197	93,93
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.969.981.000	12.375.233.131	95,41
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.361.891.269.000	3.262.341.555.302	97,04
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.266.368.569.000	1.209.696.302.933	95,52
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.949.085.770.000	1.910.286.635.191	98,01
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	146.436.930.000	142.358.617.178	97,21
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	458.646.000	401.193.925	87,47
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	374.623.000	331.161.425	88,4
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	84.023.000	70.032.500	83,35



No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	851.994.000	796.455.000	93,48
	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	851.994.000	796.455.000	93,48
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	622.844.000	520.857.430	83,63
	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	516.250.000	430.518.930	83,39
	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	106.594.000	90.338.500	84,75
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.227.041.000	5.872.639.432	94,31
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.506.987.000	2.398.048.960	95,65
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	3.720.054.000	3.474.590.472	93,4
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	22.786.072.000	22.165.827.000	97,28
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22.786.072.000	22.165.827.000	97,28
8	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	574.051.000	517.735.500	90,19
	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	574.051.000	517.735.500	90,19
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	857.240.000	797.090.624	92,98
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	181.332.000	166.430.547	91,78
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	675.908.000	630.660.077	93,31
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.902.781.000	2.891.255.004	99,6
	Pengelolaan Museum Provinsi	2.902.781.000	2.891.255.004	99,6

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, suatu organisasi dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input

yang ada, atau mendapatkan tingkat input minimum dengan tingkat output tertentu. Disamping itu, dengan adanya efisiensi teknologi, efisiensi alokasi, dan total efisiensi. Dengan diidentifikasikannya alokasi input dan output, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisiensian. Dalam teknis pengukuran, bahwa efisiensi merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk menentukan kinerja suatu unit kegiatan tertentu. Efisiensi pada dasarnya adalah optimalisasi penggunaan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Capaian keunagan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar 95,21% atau sebesar Rp 8.286.401.089.589,00. Artinya terdapat silpa sebesar 4,79% atau sebesar Rp 351.781.360.411,00. Ketidakterserapan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2025 sebagian besar diakibatkan adanya sisa lelang, Silpa BOS dan BOP SMA, SMK, dan SLB, serta ada beberapa kegiatan yang memang tidak selesai atau tidak terlaksana di tahun 2025. Kegiatan tersebut adalah sebagi berikut :

1. Pembangunan USB SMK Negeri 1 Karangjambu Kab. Purbalingga Tahap II tidak selesai dilaksanakan dikarenakan medan atau Lokasi yang menyebabkan pekerjaan memerlukan waktu yang lebih lama dari kontrak yang telah ditetapkan, progres akhir pekerjaan 97,02% pemberian kesempatan pekerjaan sampai dengan 24 Januari 2026;
2. Rehabilitasir uang leas SMAN Toroh Kabupaten Groboogan, beberapa gedung yang belum selesai yaitu di blok A2 (2 ruang kelas) diperkirakan tanggal 10 Januari sudah selesai dan bisa digunakan. Blok gedung B 4 ruang kelas tanggal 10 ditargetkan selesai dan bisa digunakan.
3. Pengadaan alat praktik SMK (CNC) yang belum dikirim ke satuan pendidikan (SMKN 5 Surakrta) alat akan di kirim dari LN (masih di gudang penyedia perjalanan ke lokasi)
4. Pengadaan server pada ruang data centre yang tidak dilaksanakan karena tusi untuk pengadaan server sudah dibackup oleh Diskominfo;
5. Apraisal PLA Elang tidak dilaksanakan dikarenakan pengadaan tanah yang rencannya akan dilaksanakan di tahun 2026 batal dianggarkan;
6. SMKN 1 Brebes dan SMKN 2 Tegal realisasi 92,51% tinggal pasang plafon, pasang keramik dan cat, diperkirakan selesai tanggl 16 Januari 2026;
7. SMKN Wiradesa, sedang berproses pasang kuda – kuda, beton, dan cor (terdapat 7 titik) target selesai tanggal 16 Januari 2026;
8. Pengadaan AI yang tidak bisa dilaksanakan karena penyedia yang tidak

memungkinkan, pengadaan server tidak dilaksanakan karena spesifikasi dari penyedia tidak sesuai dan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan untuk kegiatan lain seperti sisa belanja gaji dan sisa belanja perjalanan dinas, makan minum, dll merupakan efisiensi belanja karena digunakan sesuai dengan kebutuhan.

3.3 Inovasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir mengambil langkah kebijakan strategis untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas, antara lain: dengan fokus pada upaya Mengatasi masih tingginya ATS, angka putus sekolah, maupun Tingkat serapan lulusan (melanjutkan pendidikan dan keterserapan di Dunia Kerja). Guna mengatasi Permasalahan yang menjadi isu strategis, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan sejumlah program inovatif dan/atau afirmatif, diantaranya Pembangunan Unit Sekolah Baru, Rehab ruang kelas, Beasiswa Siswa Miskin, dan kuota afirmasi dalam Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) untuk siswa dari keluarga kurang mampu, dan terakhir melalui program kemitraan dengan sekolah swasta (dalam penyelenggaraan SPMB). Berikut inovasi yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025 :

- a. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah Blank Spot
Hal ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperluas akses pendidikan, dalam pembangunan satuan pendidikan Unit Sekolah Baru mengambil konsep dimana lebih futuristik dan modern. Pada tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membangun 9 Unit Sekolah Baru (termasuk USB lanjutan pada tahun sebelumnya) dalam rangka perluasan akses pendidikan sekolah tersebut antara lain :
 - 1) SMA Negeri 1 Garung Kabupaten Wonosobo merupakan Pembangunan USB tahap 2 dan direncanakan Pembangunan SMAN Garung dalam 3 tahap dan akan berakhir di tahun 2026;



- 2) SMA Negeri Tegal Kota Tegal, tahun 2025 merupakan tahap 2 pembangunan SMAN Kota Tegal dan akan direncanakan selesai di tahun 2026;



- 3) SMA Negeri Kemalang Kabupaten Klaten, tahun 2025 merupakan tahap awal Pembangunan USB SMA Negeri Kemalang dan akan direncanakan selesai pada tahun 2027;



- 4) SMA Negeri Watukumpul Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 merupakan tahap awal Pembangunan SMA Negeri Watukumpul, USB ini rencananya akan selesai sampai dengan 3 tahap Pembangunan yaitu selesai pada tahun 2027.



- 5) SMK Negeri Karangjambu, tahun 2025 merupakan tahap 2Pembangunan SMK Negeri Karangjambu, SMKN Karangjambu sebelumnya berdiri di tanah milik pemerintah kabupaten dan pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi mendapatkan hibah tanah dari

warga yang dengan sukarela menghibahkan tanahnya untuk membangun tempat Pendidikan, dan akhirnya pada tahun 2024 SMKN Karangjambu direlokasi ke lahan yang lebih luas.



6) Program Kemitraan dengan sekolah swasta

Dalam rangka perluasan akses Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 melakukan inovasi berupa Program Kemitraan dengan Sekolah Swasta. Program kemitraan merupakan program Kerjasama dengan sekolah swasta dengan memberikan kuota khusus pada sekolah swasta dalam SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), jalur ini disebut jalur afirmasi. Syarat jalur afirmasi merupakan siswa miskin dari golongan menengah kebawah. Melalui program ini murid dipastikan dapat menikmati Pendidikan secara gratis tanpa pungutan apapun. Adapun kuota jalur afirmasi pada tahun 2025 sebanyak 5.004 dengan Tingkat keterisian 47,76% atau sekitar 2.390 siswa.

3.4 Penghargaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 memperoleh penghargaan di tingkat Internasional maupun nasional. Adapun penghargaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Provinsi Dengan Karya Terbaik Dalam Sayembara Cerita Praktik Baik 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat oleh Kemdikdasmen. Penghargaan ini diraih karena dukungan berbagai kebijakan dan inisiatif positif yang efektif dalam penguatan Pendidikan karakter dan Upaya membumikan program

Kementerian 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.



2. Anugerah Pengimbasan dan Pemanfaatan Rumah Pendidikan
Penghargaan ini diselenggarakan oleh dari Pusat Data Teknologi Informasi
Kemendikdasmen RI



3. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2025
Penghargaan ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi

Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 2026 di Hotel Patra Semarang. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terbuka, khususnya dalam pelayanan informasi public kepada Masyarakat.



4. Apresiasi Cagar Budaya Peringkat Nasional Tahun 202

Jawa Tengah menorehkan prestasi dalam Upaya pelestarian warisan budaya bangsa. Pada apresiasi cagar budaya peringkat nasional tahun 2025, sejumlah cagar budaya asal Jawa Tengah mendapatkan penghargaan nasional yaitu :

- Prasasti Sojomerto, Kabupaten Batang
- Gedung Samsat Wonosobo
- Stasiun Solo Jebres

Penghargaan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga, merawat, dan melestariakan cagar budaya sebagai identitas, sejarah, dan kebanggaan bangsa.



5. Penghargaan Provinsi dengan peraih Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI) terbanyak se Indonesia
- Penghargaan ini diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, pada kesempatan ini Jawa Tengah menerima 57 Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.





6. Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2025 kategori Wiyata Dharma Madya dan Bunda PAUD Provinsi Peduli PAUD oleh Kemdikdasmen.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pemenuhan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan gambaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja maupun keuangan. Tahun 2025 merupakan tahun kedua pencapaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026. Adapun isu strategis pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Akses dan Pemerataan layanan Pendidikan dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sebagai implementasi kurikulum merdeka;
2. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
3. Peningkatan Mutu Pendidikan dilakukan dengan Penyelarasan kurikulum yang adaptif serta implementasi penerapan pendidikan karakter ke dalam pengembangan kurikulum sebagai wujud penguatan pendidikan karakter, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, sertifikasi kompetensi siswa, dan pembinaan kesiswaan.
4. Peningkatan tata kelola pendidikan dilakukan dengan pengelolaan manajemen sekolah dan pembiayaan sekolah serta pemanfaatan sistem aplikasi perencanaan dan pelaporan anggaran sekolah (ARKAS, MARKAS, SIPERKASA)
5. Penguatan nilai budaya dan karakter masyarakat melalui pemajuan kebudayaan di masyarakat, internalisasi kurikulum muatan lokal dengan nilai budaya dan karakter, pengelolaan dan pemanfaatan kebudayaan serta pelestarian kesenian tradisional

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai 3 Tujuan dengan 4 indikator, indikator tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Masuk dalam kategori Sangat Tinggi adapun ketberhasilan tersebut dicapai dengan melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Dalam rangka peningkatan partisipasi budaya masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan berbagai macam kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung salah satunya yaitu gelar budaya yang dilaksanakan di Banyumas, Festival Cagar Budaya di Benteng Willem Ambarawa serta parade Seni Budaya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, selain mengenalkan masyarakat dengan budaya Jawa Tengah melalui kegiatan tersebut juga tercipta ekosistem dimana ada pergerakan ekonomi masyarakat, sehingga selain peningkatan partisipasi budaya kegiatan tersebut juga secara tidak langsung menggerakkan perekonomian masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan secara merata dan inklusif dilakukan melalui berbagai macam inovasi pendidikan, melalui pemerataan akses (pembangunan USB pada wilayah blank spot, rehabilitasi sarpras pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi rusak berat), peningkatan digitalisasi pendidikan dengan pemenuhan sarprasnya (pengadaan alat TIK), serta pembiayaan pendidikan dengan pemberian BOP, BOSDA, Seragam Siswa Miskin, Pemberian Bantuan Siswa Miskin dan ATS, serta program kemitraan dengan swasta. Melalui kegiatan tersebut secara tidak langsung berdampak pada naiknya nilai RLS dan HLS di Jawa Tengah;
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan salah satunya telah dibentuknya tim Reformasi Birokrasi yang bisa mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

Indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8 sasaran dengan jumlah indikator kinerjanya sebanyak 9 indikator dengan ketercapaiannya masuk kategori sebagai berikut :

Sangat Tinggi sebanyak 7 indikator yaitu : Persentase karya budaya berperingkat nasional, Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan, Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani, APK SMA, SMK dan SLB, Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah, Angka

Partisipasi Sekolah usia 16-18 th, Indeks Kepuasan Masyarakat

Tinggi sebanyak 2 indikator yaitu : Nilai karakter siswa sekolah menengah, dan Indeks Manajemen Risiko

Capaian keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebesar 95,21% atau sebesar Rp 8.286.401.089.589,00. Artinya terdapat silpa sebesar 4,79% atau sebesar Rp 351.781.360.411,00. Ketidakterserapan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2025 sebagian besar diakibatkan adanya sisa lelang, Silpa BOS dan BOP SMA, SMK, dan SLB, serta ada beberapa kegiatan yang memang tidak selesai atau tidak terlaksana di tahun 2025. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan USB SMK Negeri 1 Karangjambu Kab. Purbalingga Tahap II tidak selesai dilaksanakan dikarenakan medan atau Lokasi yang menyebabkan pekerjaan memerlukan waktu yang lebih lama dari kontrak yang telah ditetapkan, progres akhir pekerjaan 97,02% pemberian kesempatan pekerjaan sampai dengan 24 Januari 2026;
2. Rehabilitasi ruang kelas SMAN Toroh Kabupaten Grobogan, beberapa gedung yang belum selesai yaitu di blok A2 (2 ruang kelas) diperkirakan tanggal 10 Januari sudah selesai dan bisa digunakan. Blok gedung B 4 ruang kelas tanggal 10 ditargetkan selesai dan bisa digunakan.
3. Pengadaan alat praktik SMK (CNC) yang belum dikirim ke satuan pendidikan (SMKN 5 Surakarta) alat akan di kirim dari LN (masih di gudang penyedia perjalanan ke lokasi)
4. Pengadaan server pada ruang data centre yang tidak dilaksanakan karena tulus untuk pengadaan server sudah dibackup oleh Diskominfo;
5. Appraisal PLA Elang tidak dilaksanakan dikarenakan pengadaan tanah yang rencannya akan dilaksanakan di tahun 2026 batal dianggarkan;
6. SMKN 1 Brebes dan SMKN 2 Tegal realisasi 92,51% tinggal pasang plafon, pasang keramik dan cat, diperkirakan selesai tanggal 16 Januari 2026;
7. SMKN Wiradesa, sedang berproses pasang kuda – kuda, beton, dan cor (terdapat 7 titik) target selesai tanggal 16 Januari 2026;
8. Pengadaan AI yang tidak bisa dilaksanakan karena penyedia yang tidak memungkinkan, pengadaan server tidak dilaksanakan karena spesifikasi dari penyedia tidak sesuai dan memerlukan waktu yang cukup lama

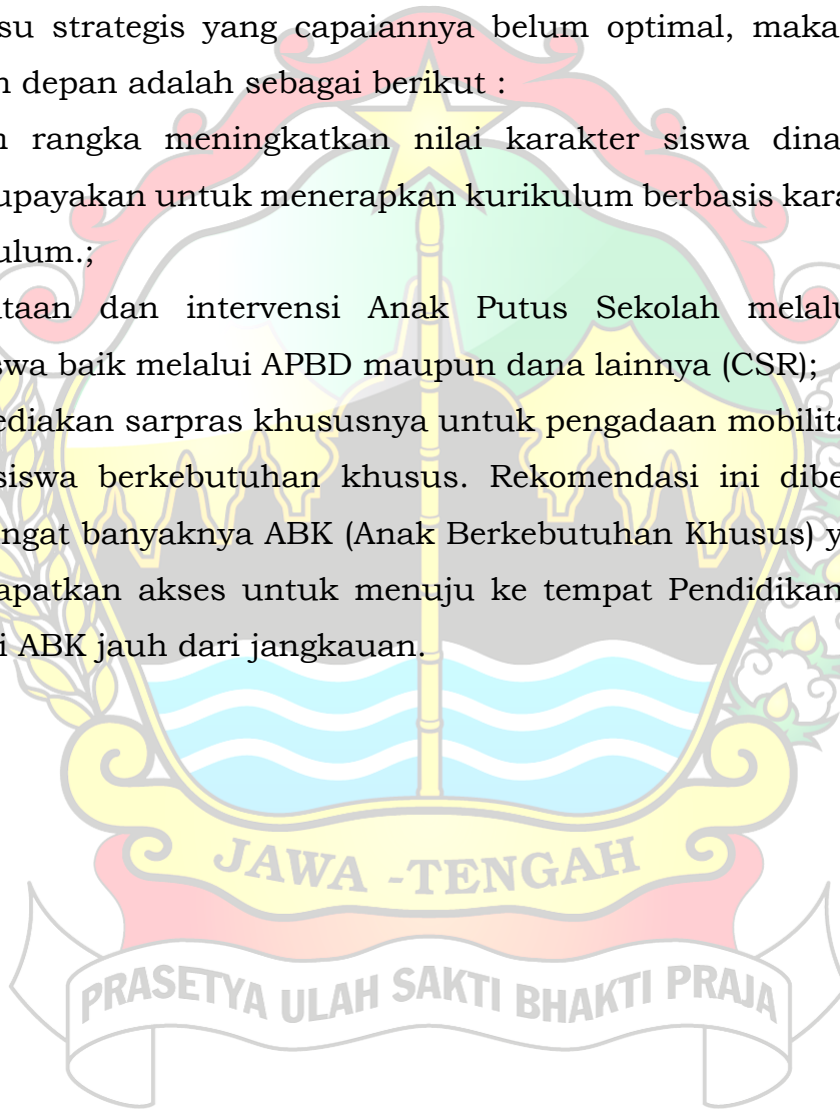
Sedangkan untuk kegiatan lain seperti sisa belanja gaji dan sisa belanja perjalanan dinas, makan minum, dll merupakan efisiensi belanja karena digunakan sesuai dengan kebutuhan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dapat dipenuhi sesuai target meskipun masih terdapat beberapa target yang belum tercapai di tahun 2025.

4.2 Rekomendasi

Guna mendukung peningkatan capaian kinerja dan dalam rangka menjawab isu strategis yang capaiannya belum optimal, maka rekomendasi untuk tahun depan adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan nilai karakter siswa dinas Pendidikan mengupayakan untuk menerapkan kurikulum berbasis karakter kedalam kurikulum.;
2. Pendataan dan intervensi Anak Putus Sekolah melalui pemberian beasiswa baik melalui APBD maupun dana lainnya (CSR);
3. Menyediakan sarpras khususnya untuk pengadaan mobilitas pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. Rekomendasi ini diberikan karena mengingat banyaknya ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) yang kesulitan mendapatkan akses untuk menuju ke tempat Pendidikan dikarenakan Lokasi ABK jauh dari jangkauan.







PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Telp. (024) 3515301 – 3546001 Faximile (024) 3520071
Semarang 50132

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. SADIMIN, S.Pd., M.Eng
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD LUTHFI
Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, September 2025

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TENGAH

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH


AHMAD LUTHFI


Dr. SADIMIN, S.Pd., M.Eng
Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

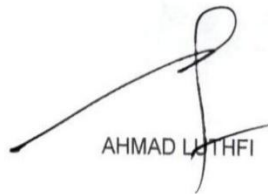


PROGRAM	ANGGARAN	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.241.010.512.000	
2 Program Pengelolaan Pendidikan	3.361.891.269.000	APBD
3 Program Pengembangan Kurikulum	458.646.000	APBD
4 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	622.844.000	APBD
5 Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	851.994.000	APBD
6 Program Pengembangan Kebudayaan	6.227.041.000	
7 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	22.786.072.000	APBD
8 Program Pembinaan Sejarah	574.051.000	APBD
9 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	857.240.000	APBD
10 Program Pengelolaan Permuseuman	2.902.781.000	APBD
	8.638.182.450.000	

Semarang, September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH


AHMAD LUTHFI


DR. SADIMIN, S.PD., M.Eng
Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telpn (024) 3515301
Faximile (024) 3520071 laman HTTP : www.jatengprov.go.id
Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat	Angka Melek Budaya	%	53,82
1.1	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Persentase karya budaya berperingkat nasional	%	16,89
1.2	Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayani	%	23,44
1.3	Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan	Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani	%	31,7
2	Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan inklusif	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,96
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,14
2.1	Meningkatnya akses pemerataan pendidikan	APK SMA, SMK dan SLB	%	83,29
2.2	Meningkatnya mutu pendidikan	Nilai karakter siswa sekolah menengah	Angka	85,94
		Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah	Angka	67,25
2.3	Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16 - 18 tahun	Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th	Angka	70,97
3	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	75,07
3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,28
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,25

Semarang, 25 Januari 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003